

TEROPONG POTENSI RADIKALISME 2020



Content



5

KATA
PENGANTAR

7

EDITORIAL

23

RISET
REDAKSI

28

KEGIATAN
BNPT

10

OPINI

16

WAWANCARA

81

FOTO
KEGIATAN





6 LANGKAH MENJADI AGEN PERDAIAN NKRI



- 1. Download**
- 2. Registrasi**
- 3. Temukan**
- 4. Diskusikan**
- 5. Konsultasikan**
- 6. Laporkan**



Cara Cerdas
lawan Radiklisme
di Dunia Maya!

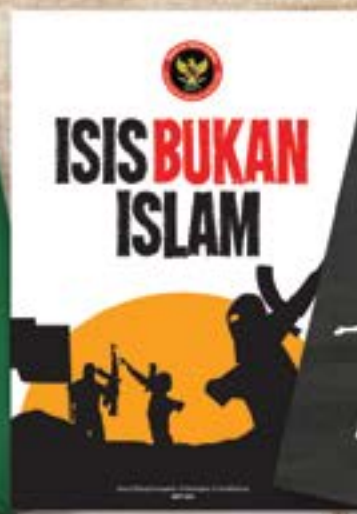


DOWNLOAD BUKU



ENSIKLOPEDI PENCEGAHAN TERORISME

Buku ini merupakan ensiklopedi tematik yang sangat berguna bagi anda yang ingin mengetahui istilah-istilah yang sering dan digunakan oleh kelompok teroris maupun istilah-istilah kebijakan penanggulangan terorisme.



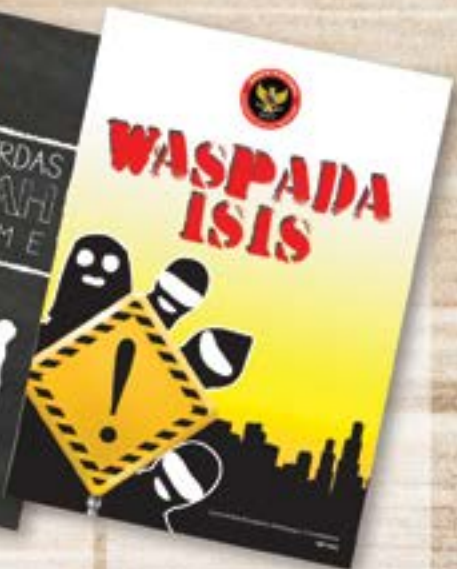
ISIS BUKAN ISLAM

Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) merupakan kelompok terorisme global baru yang mengklaim sebagai bagian dari pendirian khilafah Islam. Propaganda mereka sangat massif. Buku ini merupakan kontra narasi menegaskan ISIS dalam berbagai aspek baik konsep doctrinal maupun tidakannya sangat bertentangan dengan ajaran Islam.



ANAK MUDA CERDAS MENCEGAH TERORISME

Anak muda merupakan sasaran potensial bagi kelompok teroris. Secara faktual banyak sekali pelaku bom bunuh diri dan mereka yang terekrut jaringan teroris dari kalangan generasi muda. Buku ini menyajikan langkah-langkah cerdas bagi kalangan generasi muda untuk mewaspadai dan mencegah pengaruh dan rekrutmen kelompok teroris.



WASPADA ISIS

Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) merupakan kelompok terorisme global baru yang sangat menakutkan. Ancaman ISIS tidak hanya pada aksi brutal, ideologi kekerasan atas nama agama yang dapat mudah menyerang pola pikir masyarakat. Buku ini bacaan penting bagi anda dalam mewaspadai ancaman ISIS secara fisik maupun ideologis.

KUNJUNGI
damailahindonesiaku.net
jalandamai.net





Pengantar Redaksi

Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang selalu memberikan kekuatan kepada kami untuk tiada lelah menderma baktikan diri demi kepentingan bangsa dan Negara. Lembaran tahun 2019 telah usai, saat ini kita melangkah memasuki tahun baru yang tentunya harus dilalui dengan semangat dan rasa optimisme yang tinggi untuk selalu berbuat bagi kemajuan bangsa ini.

Redaksi Majalah Jalan Damai mengucapkan Selamat Tahun Baru 2020. Mari kita songsong tahun ini dengan semangat baru untuk Indonesia baru yang lebih damai. Indonesia yang penuh dengan semangat untuk terus meningkatkan prestasi dan kemajuan.

Ada banyak hal yang telah diraih bangsa ini pada tahun sebelumnya dan harus terus ditingkatkan. Namun, tidak sedikit pula yang perlu dibenahi dan diperbaiki. Salah satu yang menjadi catatan penting adalah persoalan kebersamaan.

Bangsa ini telah menghabiskan energi yang banyak dalam kontestasi tahun politik 2019. Kontestasi yang tidak dibarengi dengan kedewasaan telah menanamkan watak intoleransi. Suatu sikap yang kurang bahkan tidak menghargai perbedaan dalam hal apapun.

Dalam banyak hal, intoleransi yang terpujuk dan tumbuh subur adalah pintu awal bagi muncul sikap radikal yang negatif. Sementara sikap radikal adalah pondasi awal bagi lahirnya tindakan terorisme. Karena itulah, tidak salah jika menghadirkan semangat baru di tahun baru ini dengan pentingnya sikap intoleransi.

Salah satu yang akan disinggung dan menjadi tema majalah edisi kali ini adalah teropong potensi radikalisme. Tentu saja radikalisme bukan proses instan, tetapi tahapan dari radikalisasi yang panjang. Teropong ini penting untuk melihat potensi ke depan dengan cara belajar pada masa lalu.

Selamat Membaca

Bogor, 3 Januari 2019
Pemimpin Redaksi

Drs. Sujatmiko

SUSUNAN REDAKSI

Pemimpin Redaksi

Sujatmiko

Wakil Pemimpin Redaksi

Eri Suprayitno

Bendahara

Ika Kartika

Maira Himadani

Redaktur Pelaksana

Abd. Malik

Redaktur Ahli

Dr. Suaib Tahir

Redaktur

Rizki Adhianhar
Muhammad Rizki
Marchen Ades
Noor Irawan
Agus Sulaiman
Rifki Fernanda
Jenny Sharon
Diamantin R. Aisy
Nindya

Litbang

Novrika
Budi Hartawa
Irfan
Lutfi
Indra

Dokumentasi

Clara Alverina
Mila Darmayati

Desain/Layout

Ary Wibowo
Daniel Saroha
Nadine Christy
Ananda Al Givari



Pusat Media Damai

Komplek Indonesia Peace and Security Center (IPSC)
Jl. Anyar, Desa Tangkil, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16180

A close-up photograph of a person's hand holding a black pen, writing on a white notepad. The background is blurred, showing a wooden desk and a red folder. The word "EDITORIAL" is overlaid in large white capital letters, with a horizontal line underneath it.

EDITORIAL

Resolusi 2020 : Toleransi dan kesantunan Di era digital

Penulis : Abd Malik
(Redpel Pusat Media Damai BNPT)

Di era digital dengan perkembangan informasi yang begitu cepat, keragaman bangsa ini menjadi titik rawan dari provokasi dan fitnah bernafas kebencian di media sosial. Ujaran kebencian dan berita bohong menjadi alat yang mampu mengubah kerukunan menjadi konflik dan persatuan menjadi perpecahan. Gesekan antar masyarakat di dunia nyata menjadi rawan akibat provokasi kebencian di dunia maya.

Pada tahun 2019, ujaran kebencian di media sosial seakan tiada henti dan semakin meningkat. Kontestasi politik pada tahun ini seolah menjadi katalisator bagi munculnya praktek intoleransi dan ujaran kebencian yang begitu kencang.

Pertanyaanya kenapa di ruang maya terutama media sosial orang mudah mengumbar kebencian dengan bebas dan tanpa rasa takut? Ada beberapa hal yang patut diperhatikan. Pertama, ruang maya adalah lingkungan sosial bebas, cepat dan anonymous. Orang bisa menyembunyikan identitas sehingga mudah menyebarkan narasi kebencian, menghujat, dan memaki.





Kedua, kontestasi tokoh dan elite politik menularkan semangat keberanian buat masyarakat untuk saling berkontestasi di media sosial dengan saling menghujat dan menebar kebencian. Ketidakdewasaan elite politik sangat berpengaruh pada ketidakdewasaan perilaku politik warga Negara.

Ketiga, suburnya intoleransi dan fanatisme kelompok menjadi faktor keberanian masyarakat untuk menghujat dan memaki tokoh yang bersebaran secara pandangan agama, keyakinan dan pilihan politik.

Keempat, rendahnya literasi digital pelaku medsos. Ruang medsos menjadi liar seolah tanpa aturan dan kadar kebenaran. Semua yang muncul di medsos dikonsumsi dan disebarkan sebagai kebenaran itu sendiri. Masyarakat tidak menyadari efek hukum, psikologis, dan dampak sosial dari penggunaan medsos.

Memang harus menjadi keperhatian bersama bahwa saat ini masyarakat begitu sangat sensitif dengan perbedaan dan mudah tersulut. Berbeda sedikit saja menjadi bahan untuk memproduksi narasi kebencian. Dan berbeda pilihan adalah awal kemarahan.

Dunia maya sejatinya ruang sosial tempat berkomunikasi dan berinteraksi seperti layaknya kehidupan sosial. Di dunia maya juga membutuhkan kesopanan, kesantunan dan kehati-hatian dalam membuat dan menyebarkan informasi. Justru ujaran kebencian di medsos memiliki dampak yang luas daripada ujaran kebencian yang dilontarkan dalam kehidupan nyata.

Semoga mengawali tahun baru dan menjalani tahun ini masyarakat kembali menanamkan toleransi dan kecerdasan di era digital. Masyarakat Indonesia harus menyatukan komitmen untuk membersihkan ruang maya dari ujaran kebencian, hasutan, fitnah dan kekerasan.



Damai itu
Indonesia



RISET REDAKSI



Teropong Potensi **Radikalisme** 2020

Penulis : Penulis: Abd. Malik, Budi Hartawan, Irfanditya Wisnu Wardana dan Indra

Terrorisme seakan tidak pernah pupus dan berhenti. Setiap tahun dipastikan selalu ada gejolak aksi teror. Hal ini menunjukkan bahwa potensi teror sebenarnya tidak pernah padam dari tahun ke tahun. Karena itulah, terorisme sebagai aksi kekerasan dapat dipilah dalam dua kategori. Kekerasan yang bersifat manifest dalam bentuk aksi yang tampak. Kedua, kekerasan yang bersifat laten dan tidak tampak.

Menanggulangi terorisme laten tidak semudah memerangi terorisme yang manifest. Terorisme laten bersifat potensial yang mengendap dalam berbagai paham dan ideologi. Membaca potensi ke depan tidak serta merta melihat aksi kekerasan teror, tetapi juga perlu mempertimbangkan potensi latennya yang bersumber dari kekerasan kultural seperti ideologi dan doktrin kekerasan.

Kilas Balik Teror 2019

Untuk meneropong ke depan penting untuk melihat berbagai kejadian aksi teror yang terjadi pada tahun 2019. Setidak ada beberapa kejadian besar yang bisa dijadikan potret dalam melihat kondisi tahun sebelumnya sebagai bahan analisa dalam melihat potensi ke depan.



ABU HAMZAH (SIBOLGA)

Pada 12 Maret 2019, Husain alias Abu Hamzah, pelaku terduga teroris ditangkap tim Densus 88 Antiteror. Menurut laporan dari Divisi Humas Polri, disebut bahwa Abu Hamzah sudah 6 tahun aktif di kelompok jaringan teroris, selain itu, Abu Hamzah juga memiliki keahlian merakit bom. Kelompok teroris Lampung dan Sibolga merupakan jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang terafiliasi ISIS. Pada saat penangkapan, istrinya yang bernama Solimah meledakkan diri dengan bom rakitan saat bersama anaknya di kamar rumah.

ROFIK ANSHARUDDIN (SUKOHARJO)

Pada tanggal 3 Juni 2019, terjadi ledakkan bom bunuh diri di pos polisi Kartasura Sukoharjo. Menurut laporan dari pihak Kepolisian, Rofik berbaiat kepada pimpinan ISIS Abu Bakar Al-Baghdadi melalui media sosial pada akhir tahun 2018 lalu. Rofik mempelajari cara merakit bom skala kecil melalui media sosial juga.

PEMILIHAN PRESIDEN 2019 (JAKARTA)

Pada bulan Mei 2019, tepatnya pada tanggal 21-22 terjadi kerusuhan di depan gedung Bawaslu pasca pengumuman hasil Pilpres 2019. Aksi massa tersebut berbuntut kerusuhan yang luas hingga ke beberapa wilayah seperti Slipi, Petamburan, dan Tanah Abang. Kerusuhan itu pun menyebabkan korban jiwa dan korban luka. Polisi pun kemudian menangkap para perusuh yang diduga terlibat dalam aksi tersebut. Aksi kerusuhan berbuntut panjang usai terungkap adanya perencanaan pembunuhan 4 tokoh nasional yakni Wiranto, Luhut B. Pandjaitan, Budi Gunawan serta Goris Mere.

ABU RARA (PANDEGLANG)

Pada tanggal 9 Oktober 2019, terjadi penyerangan kepada Menkopolhukam Wiranto di alun-alun Menes Pandeglang, Banten. Peusukan itu merupakan amaliyah yang dilakukan oleh Abu Rara bersama istrinya.

NAS (BEKASI)

Densus 88 Antiteror menggeledah rumah kontrakan tersangka terorisme berinisial NAS di Tambun, Bekasi. Berdasarkan informasi dari pihak Kepolisian, NAS masih satu jaringan dengan pelaku penusukan Wiranto. NAS juga diketahui merupakan bagian dari Khilafatul Muslimin yang telah berbaiat kepada pemimpin ISIS.

ABU ZEE CS (BEKASI)

Tim Densus 88 kembali menangkap sejumlah terduga teroris di Bekasi, Jawa Barat, pada 23 Oktober 2019. Beberapa yang diamankan oleh pihak kepolisian karena diduga terkait terorisme adalah Surya Juniawan alias Haïdar Al Ghazi, Asep Roni, Awal Septo Hadi, Sandi Purnama alias Abu Said, Fazri Pahlawan alias Abu Zee Ghuroba, Igun Gunawan alias Gunawan.

RABBIAL MUSLIM NASUTION (MEDAN)

Pada 13 November 2019, terjadi ledakkan bom bunuh diri yang menewaskan pelaku dan melukai 6 orang yang tengah berada di Polrestabes Medan saat itu. RMN diketahui sebagai pelajar/mahasiswa, yang lahir pada 11 Agustus 1995.

Dari berbagai kejadian tersebut, tahun 2019 aksi teror sebenarnya mengalami penurunan dari pada tahun sebelumnya. Menurut data dan laporan dari Kepolisian, intensitas aksi tindak pidana terorisme di Indonesia pada 2019 menurun dibandingkan tahun 2018. Pada tahun 2019 aksi terorisme berjumlah delapan kejadian, sedangkan pada 2018 telah terjadi 19 aksi teror, menurun 57% dibandingkan 2018. Untuk penangkapan pelaku tindak pidana terorisme, pihak kepolisian berhasil menangkap 275 pelaku. Dari jumlah tersebut, 42 orang dalam proses persidangan, 220 dalam proses penyidikan, dan 3 orang pelaku meninggal dunia.



yang terjadi di kalangan milenial. Survei Alvara Research Center menemukan ada sebagian milenial atau generasi kelahiran akhir 1980-an dan awal 1990-an, setuju pada konsep khilafah sebagai bentuk negara. Survei dilakukan terhadap 4.200 milenial yang terdiri dari 1.800 mahasiswa dan 2.400 pelajar SMA di Indonesia.

Dalam kesimpulan riset ini, Alvara menyatakan bahwa mayoritas milenial memang memilih Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

sebagai bentuk negara. Namun ada 17,8 persen mahasiswa dan 18,4 persen pelajar yang setuju khilafah sebagai bentuk negara ideal sebuah negara. Paparan konservatisme dan radikalisme di kalangan milenial tak lepas dari konsumsi internet yang sangat tinggi. Menurut data Alvara, sebanyak 83,4 persen dari penduduk berusia 17-25 tahun di Indonesia mengakses internet. Sebanyak 23 persen di antaranya tergolong pecandu internet karena mengakses internet lebih dari tujuh jam sehari.

Membaca Peta Narasi

Pada tahun 2019 narasi propaganda kelompok radikal di dunia maya cukup massif. Ada tiga isu yang selalu disebarkan oleh kelompok radikal, pertama adalah Intoleransi, Anti-Pancasila dan Anti-NKRI. Tidak dapat dipungkiri bahwa bangsa Indonesia dianugerahi berbagai macam suku, bahasa dan adat istiadat termasuk agama yang juga berbeda-beda. Keragaman tersebut dalam kurun waktu yang cukup lama hidup damai dan saling tolong menolong.

Toleransi antar pemeluk agama pun cukup baik, sehingga seringkali dalam setiap upacara keagamaan satu agama dengan agama lainnya saling menjaga ketertiban dan saling membantu. Kondisi tersebut berlangsung lama bahkan telah menjadi agenda dari masing-masing pemeluk agama dan hingga hari ini masih terus berlangsung. Namun, akhir-akhir ini situasi dan kondisi tersebut mulai banyak menjadi perdebatan terutama di media sosial.

Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial dijadikan lahan untuk menyebarkan propaganda maupun agenda politik oleh semua kelompok karena hasil penelitian menurut APJI (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) pada 2018 pengguna internet telah mencapai 64,8%. Data ini berarti 171,17 juta jiwa pengguna internet dari total 246,16 juta jiwa penduduk Indonesia berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik).

Kondisi tersebut juga dimanfaatkan oleh kelompok radikal dengan menyebarkan



narasi propaganda intoleransi. Isu seperti mengucapkan selamat natal dan menjaga prosesi upacara keagamaan didorong oleh kelompok radikal dengan menarasikan bahwa perbuatan tersebut merupakan sebagai tindakan yang tidak diperkenankan dalam agama. Selain itu kelompok radikal juga menyebarkan berbagai fitnah terhadap ulama moderat yang membolehkan mengucapkan selamat kepada pemeluk agama lain dengan melabelkan ulama su'u (ulama penjilat penguasa).

Narasi lainnya yang cukup banyak beredar di dunia maya adalah anti-Pancasila. Narasi yang dibangun oleh kelompok radikal adalah Pancasila merupakan produk buatan manusia sehingga ada kewajiban untuk mengganti dengan hukum Tuhan. Turunan dari narasi ini adalah pentingnya untuk memberlakukan sistem yang telah menjadi sejarah dalam Islam, yakni khilafah. Dalam tahun 2019, narasi khilafah masih cukup tinggi dan menghiasi dalam framing kejadian dan peristiwa nasional.

Narasi yang ketiga adalah anti-NKRI. Bagi kelompok radikal hanya ada ikatan persaudaraan yakni ukhuwah Islamiyah. NKRI bukanlah suatu tempat yang dapat menguatkan ukhuwah tersebut. Persaudaraan sejati dibangun berdasarkan persamaan agama. Karena itulah, persaudaraan ini akan berjalan apabila sistem khilafah sebagai pengganti sistem demokrasi di Indonesia ditegakkan.

Tanpa disadari narasi-narasi yang disebarkan dan dikembangkan oleh kelompok radikal tersebut lambat laun telah membentuk opini sebagian orang. Narasi pun lambat laun membelah persatuan masyarakat. Peristiwa kontestasi politik terkadang menjadi ladang

bagi permainan politik identitas yang mudah merapuhkan persaudaraan kebangsaan.

Situasi tersebut kian memanas menjelang dan sampai pada Pilpres. Keterbelahan masyarakat Indonesia dapat benar-benar dirasakan bahkan bukan hanya di media sosial namun dalam kehidupan sehari-hari pengucapan atau pelabelan kafir terhadap salah satu pendukung pun kerap muncul kepermukaan. Kelompok radikal memang cukup pandai memanfaatkan situasi dan emosi kejiwaan masyarakat dengan selalu menunggangi isu-isu nasional sehingga menyebabkan "rasa" ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam kondisi inilah kemudian kelompok radikal menawarkan solusi sistem khilafah sebagai pengganti sistem demokrasi yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa.

Berbagai kejadian aksi teror, riset potensi radikalisme dan sebaran narasi pada tahun 2019 ini patut menjadi pijakan dalam melihat potensi ke depan. pada tahun ini. Paham intoleransi, anti-Pancasila dan anti-NKRI yang telah menyebar di masyarakat sejatinya merupakan bibit yang bisa berpotensi dalam meningkatkan eskalasi radikalisasi di tengah masyarakat. Potensi ini ke depan juga tidak mudah hilang. Pada tahun 2020, pola, modus dan bentuk potensi dan aksi radikalisme hampir masih mengalami hal serupa.

Butuh penanganan serius dalam menanggulangi aksi terorisme yang tidak hanya fokus pada hilir masalah. Persoalan hulu terorisme yang dimulai dari intoleransi dan radikalisme patut menjadi agenda penting. Gerakan moderasi beragama, wawasan kebangsaan dan gerakan literasi media harus menjadi 3 pilar penting dalam melakukan kontra radikalisasi baik melalui *online* maupun *offline*.



Damai itu
Indonesia



OPINI



Mereduksi Radikalisme Dengan Jalan Moderasi

Penulis : Ferdiansah Jy

(Kontributor www.jalandamai.org, Peneliti Institute of Southeast Asian Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Happy New Year 2020. Memasuki tahun baru ini, kita perlu merefleksikan tahun-tahun sebelumnya yang sudah kita lalui bersama. Akankah perilaku kita sudah sesuai dengan spirit kemanusiaan yang sudah digalakkan oleh para guru bangsa?. Apakah radikalisme yang menyebabkan banyak persoalan di tahun-tahun sebelumnya sudah sepenuhnya teratasi? Mari sejenak refleksikan bersama momentum menjalani tahun baru ini dengan membangun spirit kolektif untuk membangun moderasi demi keberlangsungan kemanusiaan.

Memasuki era disrupsi ini, kita tidak bisa menghindari gempuran gelombang tsunami informasi dari berbagai sudut di media. Kita

memasuki budaya konsumerisme khususnya informasi, saat ini media sosial (facebook, instagram, twitter dlll) menjadi asupan nutrisi informasi pertama masyarakat Indonesia mulai bangun tidur di pagi hari hingga sebelum tidur di malam hari. Selain itu, ribuan platform media online menjadi asupan informasi terpercaya masyarakat Indonesia, tanpa ada proses check and recheck validitasnya. Narasi agama juga banyak dipolitisir oleh berbagai media untuk menuangkan kepentingannya. Prinsip-prinsip jurnalisme yang sejatinya mengedepankan kebenaran sudah banyak diabaikan, dan justru lebih mementingkan komoditas komersial.

Akibat konsumsi media yang begitu massif tanpa proses klarifikasi dan pembacaan yang kritis, kita hanya menerima asupan sampah

informasi yang justru membuat kita semakin eksklusif. Hal ini diperparah dengan kondisi bangsa saat ini yang masyarakatnya begitu mudah termakan hoax, sekitar 62-65% masyarakat sukar membedakan berita hoax. Padahal, narasi hoax bisa mengkonstruksi sikap-sikap radikal karena konsumsi informasi yang tidak benar. Untuk itu, diperlukan upaya counter narasi terhadap narasi hoax yang massif dengan narasi moderasi.

Selain itu, hilangnya dalam pendidikan keagamaan kita tentang cara menghormati harkat dan martabat kemanusiaan, padahal hal ini merupakan inti dari filosofi pendidikan. Kita belajar agama, tetapi tidak banyak yang belajar 'tentang' agama. Banyak yang belajar agama, tetapi tidak belajar 'ber-agama'. Agama sejatinya menjunjung tinggi visi kemanusiaan. Kitab Al-Qur'an itu diakhiri dengan surat An-Naas, bukan Surat *Al-Mukminun*, yang menunjukkan bahwa kita harus memanusiakan manusia bukan justru mereduksi kemanusiaan.

Munculnya kelompok radikal disebabkan oleh banyak faktor. Menurut Dicky Sofjan, Dosen ICRS UGM, munculnya orang-orang radikal di Indonesia disebabkan oleh kemampuan *critical thinking* yang rendah, kurangnya memahami 'realitas' dan tidak terima terhadap kondisi riil dunia saat ini, kemudian adanya infleksibilitas dalam berpikir (*cognitive inflexibility*).

Hal ini menandakan bahwa kemampuan bacaan yang luas, kritis dan mendalam diperlukan untuk mengurangi sikap radikal di masyarakat. Sikap radikal ini juga banyak muncul disebabkan minimnya interaksi dengan

golongan yang berbeda, dan kurangnya piknik dengan memahami multikulturalisme yang ada di muka bumi. Di manapun radikalisme secara naluriah tertolak, karena radikalisme bertentangan dengan naluri kemanusiaan dan mampu mendestruksi kemanusiaan itu sendiri.

Dewasa ini radikalisme harus direduksi, salah satunya dengan jalan moderasi. Meminjam bahasa Haedar Nashir (2019) bahwa salah satu upaya yang paling solutif untuk mereduksi radikalisme adalah dengan jalan moderasi. Jika radikalisme bagian dari keniscayaan manusia, maka mereduksinya bukan dengan jalan deradikalisme. Tetapi, diupayakan dengan jalan moderasi. Karena, radikalisme menjadi persoalan yang harus terus dilawan dengan narasi moderasi, bukan justru menghilangkan radikalisme itu sendiri.

Dengan momentum tahun baru ini, sudah bukan zamannya membicarakan mayoritas dan minoritas yang seringkali memunculkan sikap radikal, karena ingatan pahit tentang konflik mayoritas-minoritas di masa lalu menjadikan kita sebagai bangsa yang terpecah-pecah, bukan bangsa yang bersatu dalam tarikan nafas perbedaan. Kita perlu banyak 'merasa' menjadi bagian dari bagian yang lain, melebur dan mengintegrasikan diri dengan yang lain sebagai bentuk dari aktualisasi *Bhinneka Tunggal Ika*.

Akhirnya, tahun baru 2020 ini kita jadikan refleksi sekaligus spirit untuk bersama-sama membangun kekuatan kolektif horizontal agar mampu menguatkan basis kemanusiaan di masyarakat. Sehingga, dapat menimbulkan kemaslahatan bersama sebagai inti dari ajaran agama. Semoga.



Damai itu
Indonesia



Manusia adalah hari ini lebih baik dan berusaha agar lebih baik dari pada hari ini. Dalam konteks pergantian tahun, manusia yang mempunyai cita-cita, tentu berusaha sekuat tenaga mewujudkannya, agar tahun 2020 lebih baik dari tahun 2019 adalah termasuk model manusia berkembang.

Mengapa tahun 2020 perlu mendapat perhatian serius? Karena tahun 2019 adalah tahun politik, di mana perhelatan demokrasi lima tahunan digelar. Tak berlebihan jika tahun 2019 adalah tahun penuh tantangan. Belajar dari pengalaman adalah guru terbaik, untuk kemudian lebih baik di tahun 2020.

Banyaknya *hate speech*, *black campaign*, provokasi, penghinaan dan narasi-narasi perpecahan yang dihembuskan, terutama di media sosial demi menumbangkan lawan dan memenangkan jagoannya, perlu segera

berkembangan manusia yang dari kemarin hari besok ini. Dalam

Resolusi 2020 : Menjadi Manusia Berkemajuan Bebas dari Intoleransi

Penulis : Hamka Husein Hasibuan
(Kontributor www.jalandamai.org.)

ditinggalkan. Kita perlu membuat resolusi yang damai; bahwa tahun 2020 harus bebas dari segala penyakit intoleransi.

Dalam konteks inilah, bagaimana menjadi manusia berkembang di tahun 2019? Jawabannya adalah tanpa menegasikan jawaban lain, bebas dari intoleransi. Musuh terbesar bangsa ini sekarang adalah intoleransi. Intoleransi sudah masuk ke segala lini masyarakat. Di pedesaan sekalipun, yang sering diklaim sebagai oase perdamaian, tidak pernah lepas dari tindakan intoleransi.

Hanya beda agama, kita sering berlaku diskriminatif terhadap agama lain. Hanya beda preferensi politik, kita dengan mudah memfitnah, menyebar *hoax*, kepada kelompok yang kita anggap lawan. Budaya saling asah dalam beragama, dan saling asuh dalam kehidupan, mulai hilang dari tengah-tengah kita.

Belum lagi maraknya penyakit masyarakat menyebar ujaran kebencian (*hate speech*). Mulai dari penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, sampai kepada penyebaran berita bohong (*hoax*). Semua penyakit ini tumbuh subur di tengah-tengah kita.

Kemajuan dan Resolusi Perdamaian



Intoleransi sudah bisa dijadikan musuh bersama di tahun 2019 ini. Menempatkan intoleransi sebagai musuh utama dan bersama tentu bukan tanpa alasan. Menurut laporan dari Koordinator Program Imparsial, selama 2019 terdapat 31 kasus intoleransi. Kasus ini meliputi pelarangan tempat ibadah, pelarangan budaya etnis, perusakan tempat ibadah, dan pelarangan bertetangga dengan agama lain. Pendek kata, kebebasan beragama mendapat lapor merah tahun ini.

Ini belum lagi fenomena di akar rumput. Adanya penolakan terhadap orang yang berbeda agamanya. “Terima kost muslim”, “terima kost muslimah,” dan segenap tindakan intoleran lainnya, menjadi hal yang lumrah di daerah kampus.

Data di atas bisa menjadi bahan refleksi bagi segenap anak bangsa untuk menjadi lebih baik di tahun 2020. Maka sudah sewajarnya, bagi segenap masyarakat Indonesia, terutama milenialnya, menjadikan perdamaian sebagai resolusi di tahun 2019 ini.

Maksud resolusi perdamaian di sini adalah setiap anak bangsa harus aktif dan ikut serta memerangi intoleransi dan segala bentuk ujaran kebencian. Dengan cara tidak men-share, like, berkomentar dan mendramatisir sebuah isu dan pemberitaan.

Massifnya intoleransi dan ujaran kebencian tidak lepas dari banyak share, like, dan komentar yang diberikan di media sosial. Tak jarang, ada sebagian pihak yang dengan sengaja menjadikan produksi hoax untuk agama dan kelompok tertentu sebagai ladang bisnis. Dalam hal ini, manusia yang mempunyai semangat kemajuan adalah manusia yang ikut serta menjadikan perdamaian sebagai prioritas utama di tahun 2020 ini.

Kampanye untuk membangun perdamaian dan menghindari masyarakat dari berbagai konflik sosial harus dilakukan di banyak level. Salah satu yang perlu diperhatikan sebagai sumber konflik adalah maraknya tindakan intoleransi. Jika tidak ditangani segera akan menimbulkan perpecahan di masyarakat yang pada



akhirnya akan menimbulkan perpecahan bangsa.

Musdah Mulia, selaku Ketua Umum Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), menyebut tak jarang tindakan intoleransi itu ditunggangi oleh kelompok-kelompok radikal atau kelompok lain yang menginginkan perpecahan negeri ini.

Masih menurut Musdah Mulia, salah satu solusi agar terhindar –setidaknya meminimalisir –intoleransi adalah melalui lembaga keluarga. “Pertama itu dimulai dari level keluarga. Sebagai orang tua perlu membicarakan isu perdamaian dan isu hate speech ini di rumah tangga. Kerena di rumah tangga itu perlu ada komunikasi yang intents antara ibu, bapak, anak-anak, dan seluruh anggota keluarga lainnya.”imbuhnya.

Dengan demikian, tahun baru dengan harapan baru perlu menerapkan dan menamakan sejak dini tentang perlunya bebas dari intoleransi. Biarlah data tahun sebelumnya itu sebagai bahan renungan itu setiap anak bangsa, bahwa intoleransi akan menjadikan pembangunan dan rasa keharmonisan terseok-seok.

Manusia Berkemajuan adalah manusia yang mau belajar dari masa lalu, demi kebaikan masa depan. Orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemari termasuk orang yang merugi, dan orang yang hari besok lebih buruk dari hari ini termasuk orang yang celaka., demikian Sabda Nabi. Dan salah satu orang yang tidak merugi itu adalah orang bisa bebas dari ujaran kebencian.



Damai itu
Indonesia

Resolusi 2020 : Menyemarakkan Toleransi dan Anti Radikalisme

Penulis : Sholikul Hadi, S.T
(Kontributor www.jalandamai.org.)

Di tahun 2020 bangsa Indonesia memiliki hajat demokrasi yaitu Pilkada di 270 daerah. Pilkada 2020 terdiri dari 9 Pilgub, 224 Pilbub dan 37 Pilwalkot. Harapannya Pilkada 2020 bisa belajar dari pesta demokrasi tahun 2019. Pemilu 2019 saat Pilpres sangat melelahkan, penuh emosi, banyak problem dan persinggungan. Masyarakat harus mendewasakan sikap demokrasi guna menghindari intoleransi. Sebab itulah, pada tahun 2020 bangsa ini harus menyemarakkan toleransi dan anti radikalisme sebagai resolusi bangsa.

Hasil survei LSI menunjukkan tren intoleransi berpolitik meningkat di tahun 2019. Penelitian LSI dilakukan pada 8 September sampai dengan 17 September 2019. Responden yang diambil warga yang sudah memiliki hak pilih atau usia 17 tahun lebih. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 1.550 responden dengan pengambilan data lewat wawancara tatap muka. Adapun *margin of error* kurang lebih sebesar 2,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel yang digunakan merupakan representatif dan dapat mewakili seluruh masyarakat Indonesia mulai dari segi gender, daerah desa kota, agama dan etnis.

Dari survei yang dipublikasikan mayoritas Muslim di Indonesia menolak non Muslim menjadi kepala pemerintahan. Pada September 2019, 59 persen orang Muslim keberatan jika non Muslim jadi presiden. Termasuk juga 56 persen mayoritas Muslim keberatan jika non Muslim menjadi wakil presiden. Sedangkan non Muslim, menunjukkan 71 persen tidak keberatan Muslim menjadi presiden, 68 persen tidak keberatan Muslim menjadi wakil presiden dan 64 persen tidak keberatan Muslim menjadi gubernur.

Data LSI ini menunjukkan rawannya intoleransi dari aktivitas politik. Data ini bukan bermaksud menyudutkan antara Muslim atau non Muslim, tetapi lebih sebagai koreksi dan pelajaran bersama dalam menyemarakkan toleransi. Memang isu-isu agama dalam berpolitik kerap dijadikan komoditas kampanye. Bahayanya kampanye dengan jualan agama di Indonesia berdampak munculnya intoleransi antara mayoritas dan minoritas.

Lembaga Riset Setara Institute juga memaparkan hasil penelitiannya pada hari Minggu, 24 November 2019. Hasil risetnya membuat peringkat 10 provinsi dengan angka pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan tertinggi dalam kurun 5 tahun. Adapun hasil riset Setara Institute; Jawa Barat 162 peristiwa, DKI Jakarta 113 peristiwa, Jawa Timur 98 peristiwa, Jawa Tengah 66 peristiwa, Aceh 65 peristiwa, DIY 37 peristiwa, Banten 36 peristiwa, Sumatera Utara 28 peristiwa, Sulawesi Selatan 27 peristiwa dan Sumatera Barat 23 peristiwa.

Kasus intoleransi belakangan ini ada korelasi

aktivitas berpolitik dengan mempermainkan isu agama. Intoleransi bukan hanya terjadi karena Muslim dan non Muslim, beda partai politik, beda mazhab, beda ormas, beda suku juga bisa memunculkan intoleransi. Tren intoleransi di Indonesia harus dipelajari apa-apa saja penyebabnya demi mendapatkan metode pencegahan dan penanganannya. Sikap intoleransi bisa diminimalisir ketika personal terbangun kesadaran berbangsa dan bernegara dalam jiwanya.

Mengutip postingan Bu Nyai Shuniyya Ruhama dalam akun facebooknya yang bernama Shuniyya Ruhama pada 07 September 2018, terkait 'Rahasia Gus Dur: Cara Mudah Memahami Islam'. Postingan Shuniyya Ruhama sangat memberi pelajaran kepada Muslim yang awam. Waktu itu Bu Nyai Shuniyya Ruhama berada di sebuah majelis di Jakarta pada tahun 2008 bertanya pada Gus Dur (KH. Abdurrahman Wahid).

"Gus, bagaimana cara memahami Islam yang paling mudah, biar kami yang awam bisa tahu benar atau salah. Apalagi sekarang banyak yang obral dalil?" tanya Bu Nyai.

"Gampang saja," jawab Gus Dur.

"Kalau kita percaya Islam itu rahmatil lil alamin, maka yang bertentangan dengan kriteria rahmatil lil alamin ya pasti salah. Bukan dalilnya yang salah, tapi penempatannya yang enggak pas," Gus Dur memperjelas jawabannya.

“Misalnya, kita percaya Islam itu memuliakan wanita. Maka semua ulasan dalam Islam yang meyudutkan wanita pasti salah, sekalipun pakai dalil-dalil. Itu pasti salah cara mengambil dan menerapkan dalilnya,” Gus Dur memberi contoh kasus.

“Misalnya, kita percaya Islam itu menjunjung tinggi kemanusiaan, maka mau pakai dalil apapun kalau sampai menghina atau merendahkan manusia karena agama, suku atau golongannya, pasti itu salah mengambilnya,” kembali Gus Dur memberi contoh kasus.

Kemudian ada audien yang bertanya, “Terus kalau ada yang bilang manusia itu harus taat

sama agamanya bagaimana, Gus?”.

Sambil terkekeh Gus Dur menjawab, “Taata kok sama agama. Taat itu ya sama Gusti Allah. Gitu aja kok repot”.

“Inilah yang kita suka salah paham. Agama itu diturunkan untuk manusia. Bukan manusia yang diturunkan untuk agama. Jangan dibolak-balik. Kacau semua nanti,” pungkask Gus Dur.

Dari cara pola berpikir Gus Dur kita bisa belajar bagaimana manusia beragama dengan benar. Jangan sampai agama dijadikan alasan untuk berbuat intoleran ataupun radikalisme. Semua agama tidak ada yang mengajarkan perpecahan dan perselisihan antar sesama. Tetapi banyak umat beragama pecah sebab salah mengambil dan menerapkan dalil dalam suatu kasus. Mari di tahun 2020 ini kedamaian bangsa kita jadikan resolusi bersama. Hajat pesta demokrasi jangan sampai dibuat memutus tali persaudaraan.



A photograph of a person's hands and arms. The person is wearing a light blue long-sleeved shirt and a black watch with a white face and a black strap. They are holding a black pen and writing on a white piece of paper. In the background, another person's hand is visible, gesturing with fingers spread. The entire image has a dark, semi-transparent overlay.

WAWANCARA



"Pentingnya Mengontrol Kurikulum dan Tenaga Pendidik untuk Mencegah Tumbuhnya Intoleransi dalam Dunia Pendidikan"

Riri Khariroh, MA

Ketua Lembaga Konsultasi untuk Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (LKP3A)



Institusi pendidikan seharusnya merupakan ruang sosial yang tidak hanya untuk transfer pengetahuan tetapi juga untuk pembinaan karakter. Namun wabah intoleransi dan radikalisme masih menjadi PR berat dalam dunia pendidikan, terutama di tingkat sekolah. Karenanya, kasus intoleransi di sekolah perlu menjadi perhatian serius.

Untuk mengetahui bagaimana sejatinya mengikis bibit intoleransi di dalam dunia pendidikan, Noor Irawan dari Pusat Media Damai (PMD) BNPT berkesempatan mewawancarai Ketua Lembaga Konsultasi untuk Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (LKP3A) Pengurus Pusat Fatayat NU, yang juga Komisioner Komisi Nasional (Komnas) Anti Kekerasan terhadap Perempuan periode 2015-2019, Riri Khariroh, MA.

BERIKUT PETIKAN WAWANCARANYA :

Pusat Media Damai (PMD) : Bagaimana sejatinya mengikis bibit intoleransi yang ada di dalam lingkungan dunia pendidikan ?

Riri Khariroh (RK) : Terkait dengan radikalisme di dunia pendidikan yang belakangan ini menjadi perhatian banyak pihak, sebenarnya sudah sangat lama keprihatinan terhadap munculnya bibit-bibit intoleransi dan radikalisme di bidang pendidikan di Indonesia itu.

Ini diperkuat adanya hasil-hasil penelitian dari berbagai lembaga penelitian ataupun survei yang pernah dilakukan oleh Lakip (Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian), UIN (Universita Islam negeri Jakarta) termasuk dari i PPIM (Pusat Pengkajian Islam & Masyarakat) serta Wahid Foundation yang sudah mengeluarkan rilis hasil penelitian tentang itu Sebenarnya kalau kita mau melakukan upaya pengikisan benih-benih radikalisme di sekolah, ada beberapa hal itu harus dilakukan.

Pertama yang perlu ditinjau adalah kurikulum formalnya seperti apa. Apakah ada atau tidak konten-konten atau materi materi bahan ajar yang bisa menyebabkan siswa itu kemudian menjadi intoleran. Selama ini kan bahan ajar ini sudah melewati screening yang cukup panjang, tetapi kadang-kadang justru yang lolos adalah yang sering beberapa kali yang ditemukan itu adalah bukan bahan ajarnya, tapi bacaan pendampingnya. Misalnya seperti orang kafir halal dibunuh yang beberapa kali viral. Itu sebenarnya bukan buku wajib, tetapi itu adalah buku dampingan dari mata pelajaran yang kemudian siswa diberikan.

Jadi saya kira dalam hal ini penting sekali utamanya kalau itu pelajaran agama, maka harus ada kontrol dari Kementerian Agama terkait dengan materi-materi yang mengandung benih-benih intoleransi atau radikalisme. Karena ini kurikulum yang sifatnya mati

Kedua, sebenarnya yang paling penting itu adalah kurikulum hidup yang dalam hal ini adalah para pengajar atau para gurunya itu sendiri. Kalau meskipun bukunya sudah sangat baik, tetapi kalau yang menyampaikan atau dalam ini adalah guru yang memiliki perspektif yang intoleran, maka justru itu yang akan ditransmisikan kepada murid-murid.

Dan hal seperti ini kita temukan banyak. Tidak ada masalah dengan kurikulumnya atau dengan bukunya, karena itu sudah melewati *quality control*. Tetapi justru pengajar-pengajarnya ini yang malah memaksakan pandangan-pandangan keagamaan mereka yang sempit dan intoleran, yang kemudian ditularkan kepada anak-anaknya. Nah ini yang justru harus diwaspadai.

Karena dalam dunia pendidikan di Indonesia ini, guru itu ibaratnya seperti center of knowledge-

nya para murid. Karena kalau gurunya bilang A, maka pasti muridnya juga akan mengikutinya. Nah menurut saya ini justru yang harus terus diawasi, bagaimana sejatinya perspektif guru terkait dengan isu-isu intoleransi maupun radikalisme itu sendiri.

Lalu kemudian terkait budaya di dunia pendidikan kita yang belakangan ini saya agak miris karena dunia pendidikan di Indonesia ini semakin lama semakin eksklusif, jadi bukan inklusif. Maksudnya begini, sekarang ini banyak sekali bermunculan sekolah-sekolah yang sangat eksklusif yang hanya kelompok tertentu lah yang bisa masuk sekolah itu. Baik itu dengan nama Islam Terpadu atau dengan simbol-simbol keagamaan tertentu yang itu membuat orang yang berbeda dan yang merasa bukan bagian dari kelompok itu kemudian tidak bisa sekolah di situ.

Nah ini yang justru menurut saya kecenderungan ini yang harus diwaspadai. Dan sekarang ini justru banyak menjalar juga di sekolah-sekolahnya pemerintah dalam hal ini sekolah-sekolah negeri. Kita bisa melihat Sekolah Negeri itu harusnya siapa saja boleh masuk di situ, karena ini adalah sekolah yang difasilitasi oleh negara sehingga tidak boleh eksklusif untuk kelompok tertentu.

Tetapi belakangan ini sekolah negeri itu kemudian banyak yang wajahnya seperti sekolah swasta milik kelompok tertentu, termasuk juga misalnya anak-anak perempuan yang kemudian diwajibkan untuk menggunakan jilbab, lalu kalau tidak menggunakan jilbab maka kemudian dia akan mendapatkan sanksi dan sebagainya.

Padahal kalau kita lihat regulasi aturannya dari Kementerian Pendidikan sebenarnya itu mereka tidak mewajibkan. Jadi di instruksi menteri itu terkait misalnya dengan busana itu adalah pilihan. Jadi misalnya bagi anda yang ingin mengenakan

busana muslim maka aturannya seperti ini. Tetapi itu bukan kewajiban.

Karena apa ? karena ini sekolah negeri yang ada di bawah naungan negara dan harusnya siswa ataupun siswinya diberikan pilihan untuk menentukan kebutuhan dan juga keyakinan mereka sendiri. Jadi menurut saya poinnya adalah munculnya institusi pendidikan yang kemudian menjadi eksklusif itu harus terus-menerus di waspadai.

PMD : Jadi upayanya kongkretnya harus seperti apa untuk bisa mengikis bibit-bibit intoleransi di dunia pendidikan itu ?

RK : Misalnya seperti ini, kalau yang biasanya kami dan teman-teman lakukan utamanya untuk sekolah-sekolah, pertama, kami biasanya melakukan kampanye-kampanye perdamaian di sekolah-sekolah. Kampanye tentang multikulturalisme di sekolah, lalu kemudian biasanya anak-anak murid didik itu kan karena sekolahnya itu sangat homogen, dia tidak pernah mengenal orang-orang yang misalnya di luar keimanan dia, di luar sukunya dia.

Makanya menurut saya penting pertama, bagaimana para pendidik itu membuka ruang seluas-luasnya buat anak didiknya untuk bertemu atau membuat ruang-ruang pertemuan antara mereka yang berbeda-beda. Dan program-program seperti pertukaran murid-murid antar iman antara mereka murid yang muslim dengan yang non muslim, termasuk juga antara suku yang satu dengan suku yang lain sekarang ini juga banyak digalakkan.

Tujuannya tentu agar supaya anak didik ini sebenarnya mengajari mereka How to respect terhadap bagaimana mereka menghargai, menghormati orang-orang atau teman-teman mereka yang memang bisa jadi berbeda. Tentunya hal itu sangat penting dan itu harus didukung oleh

sekolah itu sendiri, bahwa sekolah itu tidak boleh eksklusif hanya untuk kelompok tertentu.

Lalu yang kedua juga menatakan budaya di sekolah itu sendiri yang antara murid yang satu dengan murid yang lain itu harus saling menghormati terlepas mereka dari latar belakangnya seperti apa.

Kemudian yang ketiga juga saya kira memang penting untuk terus melakukan perbaikan terhadap kurikulum di dunia pendidikan kita, karena kalau yang sifatnya materi-materi yang memang itu wajib kemungkinan kontrolnya cukup ketat, karena itu melewati Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) dan sebagainya. Lalu kalau pendidikan agama juga melewati tim dari Kementerian Agama

Tetapi kalau buku-buku pendukung yang memang itu tidak wajib, hanya untuk memperkaya, nah itu yang sering kali kelewatan.

PMD : Apakah karena pengawasannya kendor atau bagaimana sehingga bisa lolos ?

RK : ini memang kadang-kadang ada kelompok-kelompok yang sengaja menyusup masuk melewati itu. Karena kalau melewati kurikulum yang resminya sulit karena sekarang tingkat screeningnya cukup tinggi, maka buku buku pendamping ini lolos. Bahkan bisa jadi para pemilik atau penulis buku ini mendekati ke gurunya atau bisa jadi itu dikirim secara gratis untuk masuk ke perpustakaan

Karena sekarang ini banyak info-info misalnya sekolah-sekolah yang membutuhkan buku gratis untuk sekolah. Nah karena kadang-kadang sekolah ini ingin perpustakaanya penuh itu dan main minta, tetapi pihak sekolah ini tidak melihat buku itu isinya apa.

Bahkan kadang ada juga pihak sekolah yang tidak memahami hal-hal infiltrasi seperti itu atau tidak memahami isi buku itu. Baru setelah ditemukan oleh orang yang kemudian di capture lalu kemudian diviralkan di sosial media, baru kemudian ramai di publiK, Jadi untuk buku buku pendamping itu memang dari pihak sekolah maupun dinas pendidikan sangat penting untuk melakukan monitoring.

PMD : Sebenarnya faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya intoleransi di dalam dunia pendidikan itu ?

RK : Faktanya banyak. Yang paling banyak ditemukan oleh kawan-kawan terutama yang oleh periset atau peneliti-peneliti itu sebenarnya intervensi dari alumni-alumni sekolah tersebut, terutama melalui Rohis (Rohani Islam).. Rohis itu banyak dipegang oleh alumni-alumni. Mentor mentornya kan alumni-alumni yang mereka sebenarnya alumni sekolah itu yang ada di luar tapi mereka kemudian kembali melakukan monitoring terhadap adik-adiknya.

Meski tidak semua Rohis di sekolah, tetapi kadang-kadang pihak sekolah itu tidak mengontrol dan tidak sadar bahwa ada Rohis yang terpapar radikalisme dan intoleransi. Tapi ada banyak juga yang terpapar akibat pengaruh dari alumni. Sebenarnya pengaruh dari para alumni terhadap kegiatan yang sifatnya ekstra, karena kegiatan yang sifatnya wajib biasanya alumni tidak bisa untuk ikut intervensi. Sekolah harus tahu sebenarnya alumni ini mengajarkan apa sih.. ?

Karena memang banyak alumni-alumni itu punya misi untuk melakukan transfer ideologi yang selama ini mungkin mereka pegangi agar itu bisa di internalisasi oleh adik-adik mereka itu. Apalagi

kalau sekolah ini melihat alumnnnya itu mungkin sukses atau seperti bisa dijadikan role model, Nah itu yang harusnya pihak sekolah ikut mengontrol apakah alumni itu memberikan dampak yang positif dalam arti membuat misalnya anak-anak sekolah itu menjadi lebih aktif, lebih toleran dan sebagainya ataukah justru malah para alumni ini mengajarkan misalnya ideologi-ideologi yang bertentangan dengan kemajemukan dan juga keberagaman yang ada di Indonesia

Faktor yang kedua ini dari pengalaman pribadi saya, ternyata infiltrasi intoleransi dan radikalsime di dunia pendidikan ini tidak hanya lewat Rohis yang disampaikan oleh para alumnnnya saja, tetapi juga melalui forum informal wali murid. Jadi parenting itu melalui misalnya melalui forum orang tua murid. Nah forum seperti ini juga ada menggunakan itu untuk menyebarkan apa bibit-bibit radikalisme baik itu melalui forum-forum pengajian.

Awalnya saya lihat baik, misalnya mengadakan pengajian rutin reguler untuk orang orang tua murid, tapi setelah lama lama saya perhatikan kok materi ceramahnya seperti itu, lalu tema-temanya kenapa seperti ini. Dan itu ternyata bukan di lingkungan sekolah anak saya saja, ternyata itu juga banyak yang seperti itu.

Jadi kelompok-kelompok berpahaman keras ini memang memiliki beragam cara untuk menyebarkan paham-paham itu secara pelan-pelan. Karena institusi pendidikan ini bagi kelompok tersebut sangat penting untuk menyebarkan ideologi serta menanamkan militansi dan sebagainya itu.

Untuk itu kita sendiri harus melakukan banyak sekali upaya untuk membentengi anak-anak, murid dan juga guru-guru, juga kepala sekolahnya. Karena kasus dimana kepala sekolahnya yang terlibat juga

banyak. Termasuk juga orang tua orang melalui forum-forumnya itu tadi. Tetapi bukan berarti kemudian kita curiga, bukan itu, Tetapi bagaimana forum-forum itu tidak justru menjadi pintu masuk bagi kelompok-kelompok radikal ekstrimis ini untuk menyebarkan ideologinya

PMD : Beberapa waktu lalu ada kasus sekolah yang mengeluarkan siswanya karena mengucapkan selamat ulang tahun kepada temannya yang berlainan jenis. Lalu ada intimidasi sekolah terhadap siswi, karena siswi tersebut tidak menggunakan jilbab ketika di sekolah. Bagaimana menurut tanggapan mbak Riri mengenai adanya kejadian tersebut. Apakah sekolah tersebut berlebihan?

RK : Menurut saya itu telalu berlebihan. Sangat berlebihan, dalam arti begini, sekolah itu kan sebuah institusi pendidikan yang harusnya di situ mengamalkan nilai-nilai, menghargai dan kemudian nilai-nilai kemanusiaan kepada anak muridnya. Termasuk juga mendorong munculnya daya kritis dari para siswa dan juga para muridnya terkait dengan ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi institusi pendidikan itu harusnya justru menjadi sumber pencerahan dan juga mempertajam daya kritis dari anak murid atau anak didik terkait dengan pengetahuan dan juga ilmu yang mereka pahami.

Tetapi ternyata justru yang muncul malah bagaimana sekolah itu memaksakan nilai-nilai tertentu kepada anak didik itu sendiri, termasuk juga praktek-praktek dengan motif tertentu agar itu diikuti oleh siswanya, termasuk kasus mengucapkan ulang tahun terhadap lawan jenis saja dikeluarkan dari sekolah.

PMD : Tapi katanya itu sesuai aturan dari sekolahnya yang memang aturannya seperti itu.

Dengan menerapkan aturan seperti itu apakah sekolah ini tidak melanggar Hak Asasi dari muridnya dan tidak menerapkan budaya toleransi sebagai bangsa yang beragam?

RK : Nah itu dia, maksudnya begini, mengucapkan ulang tahun itu sebuah selebrasi yang biasa. Itu soal relasi kemanusiaan saja sebagai seorang sahabat, sebagai seorang teman, tidak ada kaitannya dengan agama. Kalau kita ulang tahun kemudian kita ada yang mengingat, apalagi mendoakan. Semua ucapan ulang tahun isinya doa, semoga panjang umur, sehat, tambah rezekinya, kan selalu seperti itu. Itu kan doa, termasuk dengan lawan jenis. Ada apa tidak ucapan ulang tahun yang isinya bukan doa?

Apakah itu kemudian itu melanggar nilai-nilai agama ? Kan tidak. Maksudnya begini, cara beragama seperti ini yang membuat orang menjadi menjadi beragama yang sangat dangkal . Ini sebenarnya bukan inti agama. Inti agama itu ketakwaan, hubungan habluminallah dan habluminannas. Ulang tahun ini habluminannas itu, meskipun itu tidak ada di Al Quran, tidak ada di hadis, tetapi ini praktek budaya kemanusiaan biasa.

Jadi hal itu tidak perlu dibawa ke agama. Agama itu sesuatu yang adi luhung, sesuatu yang dalam. Kalau kemudian disempitkan menjadi hal-hal semacam ini maka agama akan kehilangan daya tanggapnya terhadap kehidupan umat manusia. Dan ujung-ujungnya malah justru sangat mengawatirkan, orang kemudian menjadi anti agama. Dianggap agama ini kok mengekang sekali, begini saja tidak boleh dan segala macam.

Apalagi untuk anak muda, dia akan menjadi apatis dengan agama dan mereka bisa meninggalkan agama, dan itu yang terjadi di negara barat. Karena dianggap agama itu tidak membawa pencerahan,

tidak membawa kedamaian dan sebagainya yang orang kemudian menjadi anti agama. Jadi menurut saya agama itu jangan dipersempit, dikerangkeng dengan praktek-praktek yang sifatnya remeh-temeh.

Lalu kasus yang kedua soal jilbab. Ini lagi lagi ini fenomena yang cukup lama, jadi pemaksaan menggunakan jilbab di institusi pendidikan. Kalau itu institusi pendidikan swasta dalam arti yang memang sejak awal sudah menerapkan aturan seperti saya dulu di sekolah Islam yang sejak awal masuk sudah tahu kalau seragamnya begini, yang memang ditujukan untuk orang Islam, kalau itu tidak masalah.

Tapi ini lagi-lagi, kalau ini sekolah negeri dimana sekolah negeri ini sudah dibangun oleh masyarakat yang beragam, dengan pajak masyarakat yang itu beragam latar belakangnya. Dan lagi-lagi aturan kalau kita mengikuti aturannya di peraturan Menteri (Permen) yang mengeluarkan jaman pak Nuh, itu sebenarnya itu pilihan.

Jadi kalau yang mau pakai jilbab itu ya begini, nggak mau pakai jilbab itu begini, maksudnya itu hanya pilihan saja. Silahkan anak didik sendiri yang memilihnya. Dan kalau terkait dengan kasus ini karena saya dulu Komisioner di Komnas Perempuan dan mengamati serta banyak melakukan pemantauan terhadap isu ini pada akhirnya juga kemudian perempuan banyak jadi korban kewajiban pakai jilbab.

Tetapi lagi-lagi ini poinnya adalah sekolah negeri, yang mana sekolah negeri itu dibangun dan tujuan dari sekolah negeri ini adalah supaya seluruh warga negara itu mendapatkan hak-haknya untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Nah kalau gara-gara semacam ini terus kemudian ada intimidasi dan sebagainya, tentunya hal itu menjadi hak pendidikan anak didik itu menjadi hilang.

PMD : Lalu bagaimana sejatinya pemerintah juga ikut berperan serta mengawasi lembaga mendidikan dalam menangkal bibit intoleransi di dalam dunia pendidikan?

RK : Saya kira posisi pemerintah terutama dalam hal ini terkait dengan dengan menangkal bibit radikalisme dan terorisme di sekolah itu sangat sentral. Pemerintah sebagai regulator melalui peraturan perundang-undangnya itu penting untuk memberikan payung hukum yang jelas. Karena institusi pendidikan ini sekarang desentralisasi memang beberapa daerah memiliki aturan-aturan yang spesifik sesuai dengan itu.

Nah itu yang seringkali menjadi masalah terkait dengan berbusana tadi itu juga begitu karena dianggap misalnya daerah-daerah yang memang religius itu. Sekolah Negeri juga begitu, itu sering kita temukan.

Kedua, saya kira pemerintah sangat penting untuk memberikan atau melakukan upaya-upaya pencegahan secara sistematis. Sistematis disini mulai dari bagaimana membangun kurikulum yang lebih mengarah kepada pendidikan karakter. Sekarang sudah banyak dilakukan, tetapi menurut saya pada level implementasinya itu masih kurang. Pendidikan karakter sendiri itu tidak hanya diajar dalam arti tutoring saja tetapi juga mengajarkan akhlak yang baik itu seperti apa.

Lalu bagaimana kemudian menghargai itu menjadi sebuah Praktek Seni, sebuah budaya, yang harus diangkat pemerintah. Pendidikan yang toleran, inklusif, termasuk ramah terhadap disabilitas, ramah terhadap kelompok-kelompok ke menengah bawah dan juga ramah lingkungan. Saya kira itu kan semua bagian dari pendidikan karakter dan itu sangat penting

Jadi memberikan pemahaman kepada guru-guru itu juga menurut saya menjadi ujung tombak untuk supaya pemerintah bisa memastikan bahwa institusi pendidikan ini tidak menjadi sumber berkembangnya bibit toleransi.

Dan yang terakhir juga harus ada ketegasan dari pemerintah ketika ada sekolah yang mengajarkan intoleransi radikalisme dan bertentangan dengan peraturan yang ada. Itu perlu ada sanksi. Di Indonesia kalau ada sanksi baru orang takut. Jadi pemerintah harus tegas dalam hal ini karena kalau tidak, bisa menjalar dan berbahaya sekali nantinya.

PMD : Kalau sekolah negeri mungkin bisa mencopot pejabatnya tapi kalau untuk sekolah swasta bagaimana, memberikan sanksinya seperti apa?

RK : Institusi pendidikan ini kalau di Indonesia itu kan banyak ragamnya. Ada yang di bawah Kementerian Agama ada yang dibawah Kementerian Dikbud, kemudian ada yang dimiliki oleh Yayasan-Yayasan. Ini menjadi tantangan tersendiri buat pemerintah. Bagaimana institusi pendidikan yang sangat bervariasi di Indonesia ini bisa menjadi penopang nilai-nilai toleransi, keberagamaan, dan kemajemukan yang memang sudah menjadi DNA nya Indonesia.

Yang sering terjadi itu kalau dari pengalaman saya karena memang pendidikan itu terdesentralisasi. Jadi kadang-kadang pemerintah pusat itu selalu mengatakan kita nggak punya tangan untuk menangani kasus di daerah karena desentralisasi. Tetapi menurut saya, meskipun desentralisasi tapi kan pemerintah itu punya wewenang, meskipun mungkin bukan penutupan.

Jadi kalau misalnya ada indikasi bahwa sekolah ini mengajarkan nilai-nilai intoleransi ya harus ada sanksi. Tapi disatu sisi memang posisi pemerintah nggak boleh Represif, karena kalau Represif maka itu akan menimbulkan gejolak dan berpotensi melanggar hak anak didik dan juga pendidikan itu sendiri. Tetapi pemerintah juga jangan terlalu lemah juga menghadapinya ketika ada institusi pendidikan yang sudah sangat kuat terindikasinya. Kalau kemudian pemerintah tidak melakukan apa-apa itu juga tidak boleh.

Jadi memang diperlukan strategi dan teknik yang lebih soft dan mengembangkan dialog. Saya kira kemudian melibatkan semua pihak karena sekolah ini stakeholdernya banyak. Mulai dari kepala sekolah, guru, murid, orang tua murid termasuk juga lingkungan sekitar juga.

Jadi kalau misalnya ada sekolah yang memang terindikasi seperti itu maka penting untuk dilakukan dialog dengan stakeholder itu dan biasanya kalau masyarakat merasa keberadaan institusi pendidikan itu meresahkan, biasanya mereka akan bertindak juga. Dan saya kira kalau sudah masyarakat seperti wali murid melakukan protes, saya kira sekolah juga tidak akan berani macam-macam.





KEGIAT
BN



ATAN
PT

**“BALI WORK PLAN
MULTI-SECTORAL
AND ASEAN PART**

IN 2019-2025 TASK FORCE (MTF) NERS MEETING”

Bali Work Plan, Langkah Indonesia & ASEAN Gandeng Badan Internasional Tangani Ekstremisme Kekerasan

Nusa Dua - Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) kembali membuat inovasi penanganan violent extremism atau ekstremisme kekerasan dan deradikalisasi lintas negara. Selain memperkuat sinergi antar negara, Indonesia bersama negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) makin memperkuat sinergi tersebut dengan menggandeng badan-badan internasional dengan digelarnya "Bali Work Plan 2019-2025 Multi-Sectoral Task Force (MTF) and ASEAN Partners Meeting" di The Hilton Nusa Dua Resort, Bali, 11-12 Desember 2019.

"Bali Work Plan ini adalah upaya Indonesia bersama seluruh negara ASEAN dalam menggandeng badan-badan internasional utamanya untuk membicarakan masalah yang sangat mendasar berkaitan dengan violent extremism dan deradikalisasi. Ini masalah-masalah dunia harus mendapat atensi dengan baik, sehingga keterlibatan badan internasional ini akan lebih memaksimalkan penanganan violent extremism dan deradikalisasi lintas negara," ujar Kepala BNPT Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH, usai menghadiri kegiatan tersebut, Kamis (12/12/2019).



Suhardi menjelaskan, saat ini permasalahan violent extremism ini menjadi masalah yang sangat aktual sehingga keterlibatan badan internasional seperti ASEAN USAID Office, UN Misson, Unicef, ILO, IOM, UNOCT, UNODC, UN Women, dan lain-lain, sangat dibutuhkan. Melalui forum "Bali Work Plan" inilah sinergi dan langkah-langkah disusun dalam rangka menangani violent extremism.

Menurut mantan Kabareskrim Polri ini, sinergi ini sangat penting. Pasalnya untuk menangani violent extremism, Indonesia tidak bisa memecahkan masalah sendiri.

"Kita butuh teman, butuh organisasi yang bisa sama-sama menata, memecahkan masalah tersebut. Bukan hanya negara, tetapi juga organisasi internasional termasuk civil society. Peran mereka sangat penting karena mereka lebih tahu yang terjadi di tengah masyarakat dan itu sangat membantu," terang Suhardi.

Kepala BNPT menambahkan, sinergi antar negara dan badan internasional juga sebagai langkah dalam mengantisipasi globalisasi yang sangat cepat.



"Kalau masalahnya gak bisa kita selesaikan dengan cepat itu akan menambah masalah baru. Hasil forum ini akan langsung disinergikan dalam pelaksanaan penanganan violent extremism, baik Indonesia maupun organisasi internasional, termasuk pendanaan masing-masing," tutur mantan Kapolda Jawa Barat ini.

Sementara itu, Deputy Kerjasama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto menjelaskan, Bali Work Plan 2019-2025 merupakan inisiatif Indonesia melalui pembahasan yang intensif dalam mekanisme SOMTC telah diadopsi pada Pertemuan ke-13 ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) di Thailand, November 2019. Bali Work Plan ini merupakan Work Plan yang bersifat lintas sektoral dan lintas pilar terbesar di ASEAN di mana penyusunan dan implementasinya melibatkan 20 Badan sektoral, organ, dan entitas ASEAN terkait di bawah tiga Pilar ASEAN.

Selain dihadiri oleh para perwakilan dari 10 negara ASEAN SOMTC serta perwakilan dari 20 Badan Sektoral ASEAN terkait, pertemuan juga dihadiri oleh 10 Negara ASEAN Dialog Partners, 5 Negara ASEAN Development Partners, serta beberapa perwakilan organisasi Internasional dalam naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

"Pertemuan konsultasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai Bali Work Plan kepada seluruh ASEAN Partners, sekaligus mengajak bersama-sama untuk dapat berkolaborasi dalam implementasinya," kata Andhika.

**“DIALOG KEBANGSAAN
MENANGKAL ANCAMAN RADIKALISME
DI KALANGAN ASN”**

Antisipasi Penyebaran Radikalisme di Kalangan ASN, BNPT : Lakukan Screening Ketat



Jakarta - Penyebaran radikalisme telah menasar berbagai kalangan masyarakat. Bahkan, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seharusnya menjadi agen pemerintah, justru banyak malah terpapar paham yang jelas-jelas bertentangan dengan ideologi dan dasar negara Indonesia. Karena itu, screening ketat harus dilakukan di setiap penerimaan ASN di seluruh kementerian dan lembaga negara.

“Selama ini Kami (BNPT) dan Badan Intelijen Negara (BIN) yang selalu melakukan screening di setiap penerimaan ASN. Dan hasilnya efektif sehingga kementerian dan lembaga negara lainnya harus melakukan hal ini agar tidak kecolongan oleh paham kekerasan tersebut. Bahkan tidak hanya calon calon ASN, para pejabat yang akan naik pangkat pun harus di screening lagi,” ujar Kepala BNPT Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH, usai menjadi narasumber pada Dialog Kebangsaan bertema “Memahami dan Menangkal Ancaman Terorisme dan Radikalisme” di depan jajaran pimpinan dan karyawan Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) di aula Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (17/12/2019).

Suhardi menegaskan, masalah rekrutmen ASN ini tidak boleh main-main. Menurutnya, ini masalah penting, sehingga perlu adanya asesmen ulang.

“Kita ingin supaya ASN itu betul-betul tergambarkan terpetakan dengan baik, tadi juga sudah saya sampaikan langkah-langkah penanganan masalah ini. Kai berharap beberapa tahun mendatang paham itu bisa direduksi. Ini merupakan bentuk kontribusi



kepada negara demi pembangunan bangsa di masa mendatang," imbuh mantan Kapolda Jabar ini.

Suhardi mengungkapkan, BNPT siap membantu dan memberikan teknis screening tersebut bila diminta bantuan. Sejauh ini, BNPT telah banyak diminta bantuan untuk melakukan screening seperti oleh kampus-kampus saat pemilihan rektor, guru besar, bahkan dosen.

Pada kesempatan itu, mantan Kabareskrim Polri itu memberikan pencerahan dan pemahaman bagaimana radikalisme dalam perspektif negatif yaitu intoleransi, anti-Pancasila, anti-NKRI, dan takfiri. Ini penting agar para ASN memiliki resilience (ketahanan) dan bisa mengidentifikasi serta bisa mengatasi masalah radikalisme di lingkungan kerja maupun masyarakat.

"Insya Allah ini akan jadi panduan KemenPANRB dalam rangka mereduksi dan menghilangkan paham itu dari lingkungan ASN mereka. Dengan demikian, mereka (ASN) punya kemampuan untuk berkompetisi karena ASN adalah petugas negara yang

harus bisa mengaplikasikan keinginan pemerintah untuk mendapatkan kekuatan cita-cita mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur," papar lulusan Akademi Kepolisian 1985 ini.

Ia menilai, langkah Kemen PANRB menghadirkan Kepala BNPT dan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIT) Haryono merupakan terobosan yang baik dalam membersihkan radikalisme di lingkungan kerja.

Sebelumnya dalam paparannya, Suhardi menjelaskan tentang perkembangan teknologi informasi global yang sangat cepat telah mengubah dunia. Penggunaan internet dan kemajuan teknologi saat ini mendukung aspek perubahan etika dan perilaku masyarakat. Makin maraknya ketergantungan penggunaan media sosial di masyarakat menjadikan informasi yang tersebar di media sosial menjadi tidak terbandung sehingga infiltrasi radikalisme menjadi mudah. Ini juga menjadi perhatian bagi ASN Indonesia.

KemenPANRB Tjahjo Kumolo mengatakan, ASN adalah motor penggerak dan pengorganisir di lingkungan ia bekerja dan di masyarakat luas. Karena itu, ASN harus memiliki wawasan kebangsaan dan pemahaman ideologi bangsa yang baik. Menurutnya, penyebaran radikalisme dan terorisme sangat membahayakan keutuhan NKRI, disamping ancaman Narkoba yang bisa merusak mental anak bangsa.

"Awal tahun depan, kami menyiapkan konsep, sebelum menjadi ASN, mereka harus ditatar Pancasila. Harus memahami memanghi bahaya radikalisme dan terorisme, juga bahaya Narkoba. Tidak hanya calon ASN, tetapi termasuk ASN yang mau naik pangkat," kata Tjahjo.

Tjahjo menilai, ini penting agar para ASN arah reformasi birokrasi yang menjadi visi dan visi Presiden Joko Widodo dan Wapres KH. Ma'ruf Amin yang tidak hanya semata-mata birokrasi yang ramping dan cepat, tetapi birokrasi yang membangun dengan tata efektif dan efisien dengan didasari Pancasila dan pemahaman yang benar tentang bahaya radikalisme

dan terorisme.

Sementara itu, Kepala BPIP Haryono menambahkan, kehadirannya dan Kepala BNPT di kegiatan ini adalah upaya mengingatkan kembali kepada para ASN bangsa Indonesia punya dasar negara, punya ideologi negara yaitu Pancasila.

"Teman-teman ASN ini adalah mesin birokrasi, mesin pemerintah yang harus menjadi ujung tombak bagaimana mengalami Pancasila. Semoga langkah-langkah ini bisa menjadi pemantik dan penyemai nilai-nilai Pancasila di kalangan ASN. Kita tidak hanya harus mendorong masyarakat agar Pancasila, tetapi paling utama pejabat dan ASN harus lebih Pancasila," jelas Haryono.



**“DIALOG KEBANGSAAN
INTOLERANSI DAN RADIKALISME
DALAM PERSPEKTIF KEBUDAYAAN.**

Jangan Rusak Keberagaman Budaya Indonesia yang Kaya ini dengan Intoleransi

Bandung - Budaya yang dimiliki bangsa Indonesia sesungguhnya adalah budaya yang sangat majemuk dan beragam, karena Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, bahasa dan juga budaya. Tetapi bermacam perbedaan yang dimiliki bangsa ini dirusak oleh intoleransi dan radikalisme negatif yang semakin menguat.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Drs. Suhardi Alius, MH. usai bertindak sebagai narasumber dalam acara dialog kebangsaan dengan tema Intoleransi dan Radikalisme dalam Perspektif Kebudayaan. Acara yang dihadiri puluhan seniman dan budayawan ini berlangsung di NuArt Sculpture Park Bandung, Sabtu (14/12/2019).

"Dengan suku, bahasa dan budaya kita yang beragam ini seharusnya masalah intoleransi ini harus sudah selesai. Karena di bangsa ini ada hal lain yang perlu diurus seperti berkompetisi dengan negara lain di seluruh dunia. Kalau kita sibuk dengan masalah itu (perbedaan) saja dan tidak bisa diselesaikan dengan baik, akan sulit kita untuk berkompetisi," kata Kepala BNPT, Komjen Pol. Suhardi Alius.

Oleh karenanya mantan Kabareskrim Polri ini menyambut baik kegiatan yang diselenggarakan oleh para budayawan dalam rangka menguatkan kembali semangat kebangsaan bangsa ini. Apalagi para seniman dan budayawan ini memiliki komunitas yang



beragam dan kuat di daerahnya.

"Sekarang komunitasnya (seniman dan budayawan) ini luar biasa, beragam, dari berbagai macam komunitas juga tadi disini ada perwakilannya. Ternyata responnya sangat baik dan tentunya kita berharap banyak yang seperti ini dan tidak boleh berhenti. Karena ini adalah komunitas yang mendukung kita untuk mereduksi itu (intoleransi dan radikalisme)," ujar alumni Akpol tahun 1985 ini.

Dengan banyak dan kuatnya komunitas seniman maupun budayawan yang dimiliki Indonesia ini maka mantan Kapolda Jawa Barat ini pun juga meminta kepada para perwakilan komunitas budayawan ini untuk dapat menyebarluaskan dan mensosialisasikan mengenai pentingnya hidup dalam keberagaman yang dimiliki bangsa ini demi menjaga persatuan

"Karena keberagaman yang kita miliki ini harus kita sosialisasikan dan sebarluaskan. Tidak boleh sekali tetapi berkali-kali sehingga masyarakat kita punya resilience dan juga kesadaran untuk membangun bangsanya," ucap mantan Kepala Divisi Humas Polri ini.

Lebih lanjut perwira tinggi berpangkat bintang tiga kelahiran jakatya, 10 Mei 1962 ini menilai, setidaknya terdapat beberapa sektor yang perlu mendapatkan pengawasan dari infiltrasi masuk anya pemahaman radikalisme negatif. Dan tentunya hal tersebut juga menuntut adanya inovasi dalam melakukan pendekatan penanggulangan radikalisme terorisme itu.

"Sektor budaya, pendidikan dan kemajuan teknologi ini tentunya perlu pengawasan. Kemajuan teknologi yang pesat ini banyak positifnya, tetapi juga ada sisi negatifnya yang dapat melunturkan identitas nasional di kalangan generasi muda, budaya yang kian melemah serta SDM pendidikan yang justru menjadi agen radikalisme. Ini yang kita hadapi," ujar mantan Wakapolda Metro Jaya ini.

Oleh karena itu Kepala BNPT pun sangat mengapresiasi dengan digelarnya dialog tersebut yang menghadirkan komunitas para seniman dan budayawan dalam membahas masalah Intoleransi dan Radikalisme.

"Jadi saya disini tadi untuk sharing mengenai masalah intoleransi dan radikalisme yang terjadi di Indonesia dan bagaimana cara pengentasannya. Oleh sebab itu saya senang sekali diundang kesini, karena ini adalah komunitas yang mendukung kita bagaimana mereduksi itu semua," ujar mantan Kapolres Metro Jakarta barat ini mengakhiri

Dalam kesempatan tersebut, Seniman Pelopor Gerakan Seni Rupa Baru, I Nyoman Nuarta sangat sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Kepala BNPT. Dirinya menegaskan bahwa para seniman dan budayawan ini pada dasarnya sangat menerima dengan perbedaan dan keberagaman yang dimiliki bangsa ini.

"Saat kegiatan Dialog kebangsaan seperti ini, biasanya kami arahkan untuk melihat film yang bisa membangkitkan rasa nasionalisme lagi. Ini agar ingat lagi kepada budaya kita sendiri, kekayaan yang luar biasa. Karena seniman itu bangga dengan perbedaan,





karena perbedaan ini yang membuat kita (Indonesia) kaya,” ujar pria yang juga pembuat Patung Garuda Wisnu Kencana yang berdiri megah di Pulau Dewata, Bali itu.

Nyoman pun juga sangat menyayangkan, mengapa perbedaan yang sangat beragam ini justru kemudian mau dihilangkan oleh segilintir kelompok atau golongan. Padahal menurutnya perbedaan inilah yang membuat bangsa kita kaya.

“Nah sekarang ini ada upaya yang ingin memiskinkan kita yang sudah begitu kaya dengan keberagaman budaya dan malah ingin diseragamkan semuanya. Kalau semua dihilangkan seperti itu, terus kita mau ikut pakai budaya apa. Budaya yang tadinya menyenangkan, kenapa sekarang malah mau dihilangkan perbedaan itu,” ucap Nyoman mengakhiri.

Hadir dalam acara tersebut Gubernur Lemhannas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, Ketua Pengurus Wilayah (PW) Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) Jawa Barat, H Asep Syaripudin, mantan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tahun 1988-1993, Ir. Sarwono Kusumaatmadja.



**“ PENANDATANGAN (MOU)
ANTARA BNPT DAN BADAN SIBER
DAN SANDI NEGARA (BSSN)**

Kerjasama Dengan BSSN, BNPT Lakukan Pengamanan Dunia Siber Dari Ancaman Serangan Teroris



Jakarta - Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan dunia siber saat ini bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi perkembangan ini dapat membuka peluang ekonomi baru di dunia digital, tetapi di sisi lain juga dimanfaatkan oleh para pelaku aksi terorisme untuk melancarkan aksi mereka hingga menyebarkan paham mereka. Karena itu, perlu adanya upaya bersama agar hal itu bisa dihindari.

Hal itu seperti disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Drs. Suhardi Alius MH dalam acara penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara BNPT dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Jakarta, Jumat (20/12/2019).

“Jadi hari ini kami mengadakan penandatanganan MoU antara BNPT dan BSSN sekaligus perjanjian kerjasama antara Deputi II BNPT dengan Deputi Identifikasi BSSN. Kita memerlukan kerjasama dengan BSSN

karena gerakan radikal terorisme saat ini telah menggunakan ruang siber untuk menyebarkan pemahaman mereka,” ujar Kepala BNPT.

Suhardi mengatakan bahwa pihaknya membutuhkan bantuan BSSN untuk melakukan identifikasi dan mencari solusi bersama untuk mengatasi ancaman terorisme di ruang siber.

“Kita butuh bantuan dari BSSN pada khususnya untuk mengidentifikasi dan mencari solusi bersama terkait



kita ada task force di situ dan leadingnya adalah kemenkominfo. Tetapi karena infrastruktur kritikal seperti yang dikatakan tadi bisa saja jadi target serangan teroris makanya kita kerjasama dengan BSSN,” ucap Suhardi.

Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian menyampaikan apresiasinya atas MoU yang dilakukan antara BNPT dan BSSN hari ini, Menurutnya infrastruktur kritikal bisa saja menjadi target serangan teroris.

“Sebagian data tentang terorisme itu sebenarnya sudah kita kerjasamakan dan hari ini kita resmikan secara legal. Karena salah satu yang menjadi fokus kami adalah ancaman serangan terhadap infrastruktur siber kita yang kritikal. Sistem infrastruktur kritikal adalah semua objek vital nasional yang berbasis

masalah di dunia siber. Karena BSSN adalah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk keamanan ruang siber ini,” tutur mantan Kabareskrim Polri itu.

BSSN, menurut Suhardi memiliki peran yang signifikan terkait keamanan ruang siber dan salah satu tugasnya itu berhubungan dengan BNPT yakni terkait counter terorisme di dunia siber.

“BSSN memiliki peran yang sangat signifikan, oleh sebab itu kita ingin bekerja sama supaya mentransfer informasi, mentransfer pengetahuan, kompetensi dan lain sebagainya. Karena BSSN juga mengurus masalah infrastruktur siber dan teknologinya. Dan salah satunya itu berhubungan dengan BNPT untuk counter terorisme di dunia siber,” ungkap mantan Sestama Lemhanas itu

Suhardi juga mengatakan bahwa selain dengan BSSN, BNPT juga memiliki kerjasama penganggulangan terorisme di dunia maya dengan Kemenkominfo khususnya terkait penutupan akun. Tetapi dalam hal ini BSSN adalah leading sector dalam pengamanan infrastruktur siber dari serangan teroris.

“Kami telah melakukan sharing informasi, tetapi untuk penutupan akun itu ranahnya kemenkominfo,



elektronik dan tersambung dengan internet dan itu bisa saja jadi menjadi target serangan teroris,” ujar Lulusan terbaik Akmil tahun 1986 tersebut.

Lebih lanjut Hinsa menyampaikan bahwa selain infrastruktur kritis, potensi ancaman lain yang perlu diwaspadai adalah penyebaran radikalisme di ruang siber dan karena hal ini jugalah BSSN menjalin kerjasama dengan BNPT

“Selain mengamankan infrastruktur kritis, kami juga mewaspadai cepatnya persebaran informasi di internet yang bisa saja digunakan untuk mempercepat proses indoktrinasi seseorang kepada paham radikalisme dan terorisme melalui internet. Disitulah kita nanti sharing informasi, sharing pengetahuan dan keterampilan di bidang siber juga dengan rekan-rekan di BNPT,” pungkas Kepala BSSN.



PEMBEKELAN DEPUTI 1 BNPT
KEPADA PESERTA
KALBE SECURITY SUMMIT

Kalangan Swasta Harus Berperan Aktif Dalam Pencegahan Paham Kekerasan di Tanah Air

Jakarta - Paham kekerasan dapat menjangkiti siapa saja tanpa terkecuali. Karena itu perlu adanya peran bersama dari seluruh komponen bangsa, baik pemerintah dan swasta untuk mencegah penyebaran paham kekerasan seperti radikalisme dan terorisme. Dalam hal ini pemerintah juga mendorong swasta untuk ikut berperan aktif dalam mencegah penyebaran paham kekerasan di tanah air.

Hal itu diungkapkan oleh Deputy 1 Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis usai memberikan materi wawasan kebangsaan dalam acara Kalbe Security Summit dengan tema Perlindungan dan Pencegahan Dini Dari Paparan Paham Garis Keras di Kawasan Industri Pulogadung Jakarta, Rabu (11/12/2019).

“Intinya bagaimana kita memiliki semangat nasionalisme yang tinggi, kemudian bagaimana cara kita menghadapi bahaya radikalisme dan terorisme agar jangan sampai kemudian masuk ke Indonesia apalagi sampai menyebar ke kalangan swasta,” ujar Deputy 1.

Hendri mengapresiasi kegiatan yang diadakan oleh Kalbe Farma ini. Pasalnya masalah radikal terorisme ini adalah masalah bangsa. Oleh sebab itu mendorong agar swasta yang lain juga membuat kegiatan seperti ini.



“Selama ini swasta sangat jarang disentuh terkait masalah radikal terorisme ini. Karena itu saya hadir disini untuk memberikan pengetahuan sehingga mereka bisa memahami masalah ini (radikal terorisme),” tutur mantan Dansatintel BAIS TNI ini.

Hendri juga menyampaikan agar para karyawan dan masyarakat pada umumnya melakukan crosscheck terlebih dahulu jika menemukan berita yang mencurigakan di media sosial (medsos).

“Paling utama adalah ketika mendapatkan informasi di medsos, tolong di kroscek dahulu atau saring sebelum sharing. Sehingga kita tidak ikut menyebarkan fitnah kalau ternyata itu adalah berita hoax,” katanya.

Senior Manager Eksternal Communication & CSR Kalbe Farma Hadi Nugroho menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Deputy I BNPT untuk memberikan materi dalam kegiatan Kalbe Security Summit ini.

“Dengan adanya kegiatan hari ini kami dapat memahami apa sih radikalisme dan lainnya yang bisa saja disekitar kita. Supaya kami bisa mengetahui bagaimana itu terjadi dan bagaimana mengatasinya,” ujar Hadi.

Sementara itu, Deputy Director Enseval Kalbe Farma Yuniati Rahmat mengungkapkan paparan yang disampaikan oleh Deputi I BNPT tadi dapat dijadikan sebagai pelajaran untuk pembinaan SDM di perusahaan ke depannya.

"Hari ini kami jadi bisa belajar banyak tentang paham kekerasan. Karena itu kami akan hati-hati lagi dalam rekrutmen dan pembinaan SDM kami agar tidak terpapar hal-hal negatif yang kontra produktif untuk perusahaan. Kami juga akan tetap menjaga agar perusahaan kami tidak membeda-bedakan suku, budaya, agama dan lainnya," tutur Yuniati.



WAWASAN KEBANGSAAN
DAN NASIONALISME
DALAM PROGRAM SEKOLAH
PIMPINAN MADYA BANK INDONESIA

Calon Pemimpin Harus Memiliki Wawasan Kebangsaan yang Tinggi



Jakarta - Masih masifnya penyebaran paham radikalisme dan terorisme di masyarakat, membuat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tidak henti-hentinya melaksanakan upaya pencegahan terhadap ancaman penyebaran paham radikalisme dan terorisme tersebut. Ini dilakukan guna meminimalisir penyebaran pengaruh paham radikal terorisme yang tidak hanya ditujukan pada masyarakat, pelajar ataupun mahasiswa saja, tetapi juga para pemimpin yang ada di lembaga negara.

Ini tentunya sangat berguna untuk menumbuhkan dan menguatkan daya tangkal terhadap pengaruh paham radikal dan terorisme di lingkungan lembaga-lembaga negara maupun pemerintah. Hal tersebut terlihat saat Deputy I bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis saat memberikan Pendalaman Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme dalam program ekoloh Pimpinan Madya Bank Indonesia (SESMAMBI) Angkatan II Tahun 2019.

“Para calon pimpinan harus memiliki wawasan kebangsaan yang tinggi agar dalam mengelola negara

nantinya menjadi baik dan sejalan dengan konsensus dasar NKRI. Apalagi di lembaga seperti Bank Indonesia (BI) ini memiliki peran vital dalam mengatur kebijakan perbankan di Indonesia,” kata Deputy I BNPT Mayjen TNI Hendri P. Lubis usai acara tersebut yang berlangsung di Kampus Bank Indonesia Institute, Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Dihadapan para audience Deputy I BNPT menjelaskan bahwa betapa cepatnya perkembangan teknologi informasi yang telah mengubah etika dan perilaku masyarakat saat ini. Yang mana dalam perkembangannya dunia maya malah dijadikan sebagai

media bagi para oknum radikal untuk menyebarkan paham-paham radikal terorisme.

“Tentunya ini semakin meyakinkan radikalisme dan terorisme dapat terjadi dimanapun, kapanpun kepada siapapun tanpa terkecuali. Untuk itu saudara-saudara semua harus berhati-hati juga dalam menggunakan dunia maya termasuk media sosial. Karena kelompok-kelompok itu menggunakan itu semua dalam melakukan propagandanya secara halus. Banyak masyarakat yang terekrut dari dunia maya ini,” ujar mantan Komandan Satuan Induk (Dansat) Induk Bais TNI ini.

Dijelaskan Deputi I BNPT, selama ini kelompok radikal terorisme sangat aktif menggunakan dunia maya sebagai alat penyebaran propagandanya diantaranya dikarenakan dunia maya sangat mudah di akses, cepat menyebar, susah dikontrol, audience yang luas dan tentunya juga sangat murah.

“Anda harus bisa mengantisipasi ketika menerima informasi itu. Anda semua harus bersikap kritis terhadap informasi yang diterima. Jangan mudah percaya begitu saja. Harus di cek validasi dan kredibilitas dari sumber berita itu. Periksa juga kontennya dan bandingkan dengan sumber yang lain. Bahkan anda harus berani mendiskusikan dengan orang terdekat atau komunitas di lingkungan anda,” kata Menyjen Hendri mengingatkan

Di akhir acara, alumni Akmil tahun 1986 ini juga berpesan kepada para calon pemimpin Bank Indonesia agar dapat menerapkan dan mengimplementasikan khususnya yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan.

“Karena bangsa kita ini terdiri dari empat konsensus dasar yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika yang tidak boleh dilanggar. Karena kalau empat konsensus tersebut dilanggar maka yang bersangkutan tidak layak tinggal di Indonesia,” ujar mantan Komandan Korem (Danrem) 173/Praja Vira Braja, Kodam XVII/Cenderawasih ini.

Oleh karena itu mantan Dansat Intel Bais TNI ini juga meminta kepada para pegawai BI ini untuk dapat menanamkan rasa nasionalisme, pengamalan Pancasila dan kecintaanya terhadap NKRI. Karena hal tersebut bisa menjadi jangkar keyakinan berbangsa dan bernegara.



“Perkaya juga wawasan keagamaan dan mendalaminya melalui tokoh agama yang terpercaya serta memiliki pandangan yang moderat atau damai. Bentengi juga keyakinan diri anda terhadap provokasi, hasutan ataupun pola rekrutmen kelompok teroris baik di lingkungan masyarakat sekitar dan dunia maya,” kata pria yang karir militernya dibesarkan di Korps ‘Baret Merah’Kopassus TNI-AD ini.

Seperti diketahui, acara yang bertujuan untuk menyiapkan calon pemimpin Bank Indonesia yang kompeten, professional, memiliki kepemimpinan dan akhlak mulia diikuti oleh sebanyak 40 peserta dari berbagai wilayah kerja BI yang ada di seluruh Indonesia.

“Untuk itulah saya tadi memberikan berbagai pemahaman kepada para pegawai BI ini mengenai wawasan kebangsaan dan nasionalisme untuk menangkal radikalisme yang ada di lingkungan sekitarnya. Jadi mereka bersama masyarakat juga harus ikut berperan untuk mewaspadai lingkungan sekitar dan melaporkan kalau ada penyebaran paham-paham seperti itu,” ujar mantan Komandan Grup 3/Sandi Yudha Kopassus ini mengakhiri.

RAPAT KE-3 PENYUSUNAN
PERPRES **RAN PE**

Mayoritas K/L sudah Setuju, Penyusunan Perpres RAN PE Berbasis Kekerasan masuki Tahap Final



Jakarta - Pemerintah bersama masyarakat harus terus mewaspadai ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang dapat mengarah pada aksi terorisme. Untuk itulah pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Kementerian/Lembaga (K/L) terkait terus mematangkan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (Perpres RAN PE).

Hal tersebut terlihat saat Deputy I bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis yang juga bertindak sebagai Ketua Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Perpres RAN PE dalam sambutannya saat memimpin rapat ketiga penyusunan Rancangan Perpres RAN PE yang berlangsung di kantor BNPT yang terletak di salah satu Gedung Kementerian di Jakarta, Selasa (17/12/2019)

“Tanggal 22 November 2019 yang lalu kita telah menyelesaikan Rapat Kedua Panitia Antar Kementerian/Lembaga Pemerintah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Perpres tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN

PE). Dan peserta rapat saat itu menyambut baik dan mengapresiasi proses panjang perjalanan penyusunan RAN PE yang melibatkan 25 K/L terkait,” ujar Meyjen Hendri Paruhuman Lubis.

Terkait hal tersebut, Deputy I BNPT mengatakan bahwa rapat tersebut telah menyepakati untuk melanjutkan tahap proses lanjutan agar RAN PE ini dapat segera disahkan, yakni menuju tahap Harmonisasi.

“Ini mengingat Izin Prakarsa yang diberikan oleh Presiden, pada prakteknya, berdasarkan penjelasan dari pihak Setneg (Sekretarian Negara), berlaku sampai akhir Desember 2019 ini,” ujar mantan Komandan Satuan Induk Badan Intelijen Strategis (Dansat Induk Bais) TNI ini

Untuk itulah menurutnya perlu dilaksanakan rapat ketiga yang digelar pada hari Selasa ini yang mana sebagai upaya tindak lanjut dari rapat sebelumnya dengan tujuan untuk membahas langkah-langkah strategis khususnya tahap Harminisasi yang perlu dilakukan untuk mendorong Percepatan Penerbitan Perpres RAN PE tersebut.

“Karena sebagai salah satu persyaratan formal proses tahap Harmonisasi ini adalah diperlukannya persetujuan seluruh K/L yang tergabung dalam panitia penyusunan RAN PE ini dalam bentuk paraf dari Bapak/Ibu yang telah hadir pada rapat hari ini,” kata mantan Komandan Korem (Danrem) 173/Praja Vira Braja, Kodam XVII/Cenderawasih ini menegaskan.

Untuk itu alumni Akmil tahun 1986 ini berharap agar para peserta rapat yang hadir pada rapat ketiga ini

dapat bersama-sama memberikan dukungan penuh, pandangan dan masukan guna mendukung penerbitan Perpres RAN PE yang merupakan aksi nasional penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

“Karena RAN PE ini nanti akan menjadi rujukan bagi seluruh pemangku kepentingan pemerintah dan non pemerintah yang bekerja dan berkontribusi pada upaya penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme,” ujar mantan Komandan Grup 3/Sandi Yudha Kopassus ini mengakhiri.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama usai rapat tersebut Deputy III bidang Kerjasama Internasional BNPT, Andhika Chrisnayudhanto, S.IP, SH, MA, yang juga bertindak sebagai Wakil Ketua Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Perpres RAN PE menjelaskan bahwa dari segi pencapaiannya maka pada rapat ketiga ini tentunya menjadi momen terbaik di bagi BNPT. Hal ini dikarenakan dari 25 K/L yang terlibat dalam pembuatan pembuatan RAN PE ini, sebanyak 22 K/L sudah tanda tangan untuk menyetuainya.



“Tinggal tiga K/L lagi yang belum tanda tangan yakni Kemhan (Kementerian Pertahanan), BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) dan Setneg (Sekretariat Negara) karena hari ini tadi perwakilan dari tiga K/L tersebut berhalangan hadir karena mereka ada kegiatan lain,” ujar Andika.

Namun menurutnya, dari capaian ini bahwa mayoritas K/L yang terlibat telah mendukung adanya suatu Perpres tentang rencana aksi nasional penanggulangan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme itu sendiri. Dan dari penyusunan RAN tersebut dari unsur panitia antar K/L sendiri sebenarnya juga sudah final



“Tinggal kita sekarang membawa ini kepada Dirjen Perundang-undangan Kemenkum HAM untuk selanjutnya dibahas melalui proses harmonisasi. Dari harmonisasi ini nanti kita bisa lihat lagi mungkin ada perubahan, ada ini dan sebagainya. Tapi itu nanti tergantung pada proses harmonisasinya,” kata pria yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Kerjasama Regional dan Multilateral BNPT ini.

Ketika ditanya apakah ada pembahasan yang sangat alot dalam penyusunan RAN PE tersebut, menurutnya alotnya penyusunan RAN PE tersebut sebenarnya lebih pada konsepnya tentang apa yang disebut dengan violent extremism atau ekstremisme kekerasan itu sendiri.

“Tapi akhirnya kita semua sudah bisa sepakati mengenai hal tersebut pada di FGD (Focus Group Discussion) ke-3 yang kemudian disusun pada saat rapat panitia kedua sudah disepakati bahwa konsep tentang ekstrimisme berbasis kekerasan ini bisa kita pakai,” ujar pria yang sebelumnya banyak berkarir di Kementerian Luar Negeri ini

Ketika ditanya mengenai kapan target Perpres RAN PE tersebut sudah bisa ditandatangani Preseiden Joko Widodo, dirinya mengatakan, “Harapannya tentunya awal tahun 2020 mendatang sudah bisa secepatnya selesai dan ditandatangani Presiden.”

Seperti diketahui, RAN PE ini mengadopsi tiga pilar Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, sebagai strategi dan program utamanya yang meliputi, pertama, pilar Pencegahan yang mencakup Kesiapsiagaan, Kontra Radikalisasi, Deradikalisasi serta perlindungan saksi dan korban terorisme, kedua, pilar Penegakan Hukum Dan penguatan kerangka legislasi nasional dan yang ketiga pilar Kemitraan dan kerjasama Internasional.

Secara keseluruhan, pelaksanaan RAN PE ini memperhatikan prinsip hak asasi manusia, supremasi hukum, dan keadilan, kesetaraan gender, keamanan dan keselamatan, tata kelola pemerintahan yang baik, partisipasi dan pemangku kepentingan majemuk, serta kebhinnekaan dan kearifan local. Dimana aspek tersebut dalam pelaksanaannya saling berhubungan satu sama lain.

PENANDATANGAN MOU
ANTARA BNPT DENGAN PT
MRT JAKARTA

Antisipasi Ancaman Terorisme di Sektor Transportasi, PT MRT Jakarta Teken MoU dengan BNPT

Jakarta - Aksi terorisme masih menjadi kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia. Tidak hanya menargetkan manusia saja, bahkan sarana dan prasarana umum seperti sektor transportasi pun juga menjadi salah satu sasaran bagi pelaku terorisme. Yang mana sektor transportasi ini memiliki peran yang sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan guna menunjang aktifitas masyarakat yang cukup tinggi,

Untuk mengantisipasi adanya aksi terorisme di sektor transportasi ini, PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dengan melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding /MoU). Penandatanganan MoU antara BNPT dengan PT MRT ini dilakukan oleh dua Kedeputian BNPT yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sesuai dengan apa yang tertuang dalam isi MoU tersebut

Dari pihak BNPT penandatanganan dilakukan oleh Deputi I bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis dan Deputi II bidang Peindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol. Drs Budiono Sandi, M. Hum. Sementara dari PT MRT sendiri dilakukan oleh Direktur Utama PT MRT Jakarta, Ir. William P. Sabandar, M.Eng. Sc, Ph.D.. Penandatanganan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan di kantor PT MRT Jakarta, di Gedung Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat (20/12/2019).

Dalam sambutannya, Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis mengatakan bahwa MRT ini merupakan moda transportasi baru sebagai icon kota Jakarta yang



menjadi harapan, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah Jakarta. MRT diharapkan dapat menyediakan pelayanan yang baik bagi masyarakat dengan memberikan rasa aman dan nyaman bagi penggunaanya.

“Dengan penyediaan lintasan layang dan underground diharapkan dapat menjadi pilihan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari sehingga dapat mengurangi kemacetan dan polusi yang sudah menjadi masalah di kota Jakarta beberapa tahun terakhir,” ujar Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis dalam sambutannya pada acara tersebut.

Namun demikian menurut alumni Akmil tahun 1986 ini, sebagai salah satu moda transportasi yang memiliki tingkat aktifitas yang cukup tinggi, menjadikan MRT ini rentan terhadap ancaman aksi terorisme. Karena para pelaku teror ini tentunya senantiasa berusaha mencari titik lemah dari sebuah sistem pengamanan yang akan dijadikannya sebagai celah masuk untuk melaksanakan aksinya.

“Dimana dalam hal ini pengelola transportasi memiliki peran yang sangat penting dalam kelancaran, keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat pengguna moda transportasi MRT ini tentunya hal-hal yang berkaitan secara fisik ini harus dijaga,” ujar mantan Komandan Satuan Induk Badan Intelijen Strategis (Dansat Induk Bais) TNI ini.



Dalam kesempatan tersebut Deputy I juga mengingatkan kepada jajaran pimpinan PT MRT bahwa bukan hanya ancaman terhadap fisik saja yang menjadi perhatian. Ancaman non fisik juga harus menjadi perhatian dari PT MRT ini. Non fisik yang dimaksud Deputy I BNPT adalah pegawai atau karyawan PT MRT ini sendiri jangan sampai terpapar paham radikal terorisme tanpa sepengetahuan dari unsur unsur pimpinan PT MRT ini.

“Kita bisa mengamankan secara fisik tetapi kita jangan lupa untuk mengamankan pegawai-pegawai PT MRT. itu sendiri. Jangan sampai nanti pegawai PT MRT ini terpapar paham radikal terorisme yang kemudian dia mengetahui kelemahan-kelemahan sistem keamanan yang ada di MRT yang kemudian dimanfaatkan untuk melakukan aksi teror. Tentunya ini sangat rawan karena mereka lebih tahu daripada teroris yang sesungguhnya,” kata pria yang dalam karir militernya dibesarkan di Pasukan ‘Baret Merah’ Kopassus ini.

Dikatakan Deputy I, beberapa waktu lalu BNPT juga telah melakukan rapat di kantor Wakil Presiden RI yang dipimpin oleh Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarno Putri yang dihadiri jajaran pemerintah seperti Menkopolkum termasuk dihadiri Kepala

BNPT, Kepala BSSN dan sebagainya. Yang mana pada rapat tersebut intimnya bagaimana seluruh komponen bangsa ini bersama-sama menegakkan kembali ideologi Pancasila.

“Yang dibahas yakni bagaimana ideologi-ideologi lain yang bermunculan yang dapat membahayakan bangsa ini bisa kita hilangkan. Karena ini sudah terlalu lama, yakni 20 tahun lebih sejak era reformasi ideologi lain itu tumbuh subur dan masif dimana-mana. Sehingga kita perlu kerja ekstra keras,” kata pria yang pernah menjabat sebagai Dansat Intel Bais TNI ini

Kepada Dirut PT MRT Jakarta, Deputy I mengatakan kalau dirinya siap membantu pihak PT MRT jika diminta untuk memberikan pembekalan kepada para pegawai PT MRT Jakarta mengenai bahaya dan mengenali ciri-ciri penyebaran paham radikal terorisme serta upaya pencegahannya.

“Sekali lagi pak Dirut, kami siap apabila bapak mengundang kami untuk memberikan pencerahan kepada seluruh pegawai PT MRT. Karena tugas kami Mencegah, Mencegah dan Mencegah agar paham tersebut tidak menyebar ke masyarakat,” kata mantan Komandan Korem (Danrem) 173/Praja Vira Braja ini.



Lebih lanjut dikatakan Mayjen Hendri, dengan ditandatanganinya MoU antara PT MRT Jakarta dengan BNPT dimana BNPT sendiri sesuai amanat Undang Undang (UU) No.5 tahun 2018 tentang Penanggulangan Terorisme sebagai leading sector dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia, berharap dapat terjalinnya hubungan kerjasama yang baik antara BNPT dengan PT MRT Jakarta.

“Dimana di Kedeputan yang saya pimpin ini ada Direktorat Perlindungan yang dibawahnya membawai Subdit Pengamanan Obyek Vital dan Transportasi. Melalui Subdit inilah harapan kami nantinya tidak lama lagi setelah penandatangan MoU ini akan ada kerjasama yang lebih intens antara Subdit saya dengan jajaran PT MRT agar hasil dari MoU ini benar-benar bisa diimplementasikan dengan baik,” ucap mantan Komandan Grup 3/Sandi Yudha Kopassus ini

Untuk itulah menurutnya dengan adanya MoU ini kedua belah pihak bisa bersama-sama untuk saling mendukung, saling memberi semangat dan bangkit bersama. Karena yang diperlukan dalam menghadapi berbagai potensi ancaman tersebut tidak lain adalah kebersamaan

“Ketika bangsa ini kuat, masyarakat berani, dan seluruh komponen bangsa bersatu menjadikan terorisme sebagai musuh bersama, maka kedamaian akan terjamin. Semangat kebersamaan dalam melawan dan mencegah terorisme inilah yang patut kita tumbuh kembangkan dan pelihara bersama, sehingga potensi aksi terorisme akan dapat dicegah dan tidak lagi memiliki ruang dalam kehidupan bangsa Indonesia,” ujar mantan Direktur Pembinaan Pendidikan (Dirbindik) Seskoad ini mengakhiri

Seperti diketahui, ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman/MoU ini meliputi Analisis dan Evaluasi Penanggulangan Terorisme, Penyusunan Standardisasi Penanggulangan Terorisme, Latihan Penanganan Ancaman Terorisme, Sosialisasi Pencegahan Terorism yang dilakukan baik di Area Publik (Stasiun) dan Area Kerja (Depo). Selain itu lingkup lain yang termasuk dalam MoU tersebut yakni pertukaran data dan informasi dalam rangka penanggulangan terorisme dan kegiatan lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Kedeputian II BNPT Siap bantu PT MRT berikan Pelatihan Mitigasi dari Ancaman Terorisme

Jakarta - Kedeputian II bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) siap membantu PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta dalam memberikan pelatihan mitigasi terhadap ancaman serangan terorisme yang bisa saja terjadi di Area Publik (Stasiun) dan Area Kerja (Depo) yang menjadi area operasional PT MRT Jakarta.

Hal tersebut dikatakan Deputi II bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Irjen Pol, Drs. Budiono Sandi, M. Hum, pada acara penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding /MoU) antara BNPT dengan PT MRT Jakarta yang berlangsung di kantor PT MRT Jakarta, Gedung Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat (20/12/2019).

“Tentunya kita berharap untuk penindakan tidak kita lakukan, hanya pembinaan kemampuan saja. Kalau nanti dalam pelaksanaan ada pelatihan pelatihan mitigasi itu menjadi domain dari Kedeputian II dan juga staf PT MRT untuk melaksanakan kegiatan pelatihan terhadap ancaman dan mungkin ada juga peningkatan kemampuan dari staff PT MRT mengenai bagaimana cara penanggulangan terhadap ancaman terorismem,” ujar Irjen Pol, Budiono Sandi

Dikatakan alumni Akpol tahun 1987 ini, ancaman terorisme bisa terjadi dimana saja. Karena tidak ada tempat bagi negara termasuk di dunia ini yang bisa menyatakan aman dan terbebas dari serangan terorisme, termasuk di Indonesia sendiri. Menurutnya, selama dirinya berkarir di Kepolisian, yang mana 20 tahun diataranya banyak berurusan dengan masalah



terorisme hingga bergabung di BNPT, masalah terorisme ini masih saja menjadi momok bagi semua negara.

“Selam 20 tahun saya megurusi masalah penanggulangan terorisme, ternyata masalah terorisme ini masih belum selesai juga, Tidak bisa kita mengatakan tempat saya aman dari serangan terorisme. Karena ancaman itu bisa terhadi dimana saja.. Dan itu harus kita waspadai bersama dan saling menjaga lingkungan sekitar kita,” ujar mantan Direktur Bilateral BNPT ini

Terkait penandatangan MoU ini, mantan Wakil Kepalka Detasemen Khusus (Wakadensus) 88/Anti Teror Polri ini menjelaskan mengenai tugas pokok dan fungsi Kedeputian II BNPT yang dipimpinnya. Yang mana

Kedeputian II membawahi tiga Direktorat yakni Direktorat Penindakan, Direktorat Penegakkan Hukum dan Direktorat Pembinaan Kemampuan yang masing masing dipimpin oleh perwira tinggi berpangkat bintang satu.

“Direkorat Penindakan bertugas untuk melakukan koordinasi dengan Densus 88 terkait masalah ancaman



dan kejadian terorisme yang ada di Indonesia. Lalu Direktorat Penegakkan Hukum yang selalu melihat dan mengevaluasi tentang ketentuan-ketentuan termasuk saat terbitnya UU No 5 tahun 2018 tentang penanggulangan terorisme serta mengkoordinasikan seluruh aparat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana terorisme,” kata mantan Direktur Intelijen dan Keamanan (Dirintelkam) Polda Metro Jaya ini

Sedangkan Direktorat lainnya yakni Pembinaan Kemampuan yang mana sesuai dengan lingkup dari penandatangan MoU ini mungkin nantinya akan melatih jajaran PT MRT Jakarta jika terjadi ancaman terorisme.

“Dan mungkin juga nanti secara bersama-sama untuk membuat standarisasi tentang pengamanan di area publik atau area kerja yang ada di wilayah dari PT MRT Jakarta ini,” kata pria yang juga pernah menjadi Dirintelkam Polda Lampung ini .

Untuk itu mantan Kapolres Sumenep ini mengucapkan banyak terima kasih kepada PT MRT Jakarta yang mau bekerjasama dengan BNPT dan pihaknya juga

senantiasa siap setiap saat untuk bersinergi dengan pimpinan dan staf PT MRT dalam penanggulangan terorisme.

“Kami sangat yakin bahwa semua yang hadir disini mempunyai tekad yang sama yaitu satu cita-cita yang sama untuk Indonesia yang adil, maju, sejahtera, aman, damai dan sentosa. Dan kami juga berharap semoga tidak terjadi serangan terorisme terhadap MRT ini,” kata pria yang juga pernah menjadi Kapolres Nhanjuk ini mengakhiri.

Seperti diketahui, penandatanganan MoU antara BNPT dengan PT MRT ini dilakukan oleh dua Kedeputian BNPT yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sesuai dengan apa yang tertuang dalam isi MoU tersebut Pihak BNPT penandatanganan dilakukan oleh Deputi I bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis dan Deputi II. Sementara dari PT MRT sendiri dilakukan oleh Direktur Utama PT MRT Jakarta, Ir. William P. Sabandar, M.Eng.Sc, Ph.D.

PT MRT Jakarta ingin Lingkungannya Terbebas dari Ancaman Terorisme

Jakarta - Sebagai bentuk untuk mengantisipasi ancaman aksi terorisme di sektor transportasi, PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta menjalin kerjasama dengan melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding / MoU) dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Maksud dan tujuan dari kerjasama ini tentunya adalah untuk memastikan dan meningkatkan keamanan dari seluruh fasilitas yang ada di wilayah operasional PT MRT Jakarta, khususnya dalam kaitan dengan bahaya ancaman terorisme,” ujar Direktur Utama PT MRT Jakarta, Ir. William P. Sabandar, M.Eng.Sc, Ph.D. dalam acara tersebut yang dilaksanakan di kantor PT MRT Jakarta, di Gedung Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat (20/12/2019).

Lebih lanjut peraih gelar PhD dari University of Canterbury, Selandia Baru ini menjelaskan bahwa saat ini lintasan MRT Jakarta yang sudah terbagun yakni sepanjang 16 km dengan rute dari Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI).

“Dan saat ini kita bangun untuk lintasan dari Bundaran HI lanjut hingga Ancol Barat sepanjang 12 km. Lalu tahun depan akan dimulai untuk lintasan dari timur hingga barat Jakarta sepanjang 21 km,” ujar pria yang berperan dalam pembangunan kembali Kepulauan Nias dan Aceh setelah dilanda gempa dan tsunami ini.

Dijelaskannya pria yang dikenal ahli dalam bidang transportasi dan rekonstruksi pasca bencana ini, jika dilihat dari isi yang tercantum dalam MoU tersebut maka yang akan dikerjakan untuk di kerjasamakan berkaitan dengan lingkungan pembinaan, menukar informasi dan juga melakukan mitigasi dari upaya penanggulangan terorisme yang bisa terjadi di sepanjang lintasan atau di sekitar lintasan MRT Jakarta.

“Karena MRT ini merupakan sarana transportasi yang bersifat strategis untuk kepentingan nasional.



Untuk itu kami mohon dukungannya atas kerjasama ini dan memastikan bahwa security adalah suatu hal yang baik,” ujar mantan Kepala Satuan Tugas untuk Percepatan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini.

Selain itu menurut pria kelahiran Makassar 4 November 1966 ini, hal lain yang ingin dilakukan dalam kerjasama dengan BNPT adalah mendorong upaya upaya pencegahan dan juga upaya-upaya di bidang pendidikan.

“Kita sangat berharap bahwa kerjasama ini nanti bisa diturunkan dalam bentuk aksi, apakah pendidikan, apakah tadi bukan hanya fisiknya tetapi juga lihat unsur-unsur yang kemungkinan terpapar. Dan itu merupakan sebuah kesempatan untuk kami melihat seluruh sistem yang ada di MRT Jakarta ini,” ucap alumni Teknik Sipil, Jurusan Transportasi Universitas Hasanuddin Makassar ini mengakhiri.

Seperti diketahui, lingkup dalam Nota Kesepahaman/MoU ini meliputi Analisis dan Evaluasi Penanggulangan Terorisme, Penyusunan Standardisasi Penanggulangan Terorisme, Latihan Penanganan Ancaman Terorisme, Sosialisasi Pencegahan Terorism yang dilakukan baik di Area Publik (Stasiun) dan Area Kerja (Depo). Selain itu lingkup lain yang termasuk dalam MoU tersebut yakni pertukaran data dan informasi dalam rangka penanggulangan terorisme dan kegiatan lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.



Damai itu
Indonesia

RAKORNAS FKPT IV
"HARMONI INDONESIA"

Rakornas FKPT IV 'Harmoni Indonesia' Optimalkan Semangat Pencegahan Radikalisme dan Terorisme di 32 Provinsi



Jakarta - Di akhir tahun 2019, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). Rakornas yang digelar untuk ke-4 kali ini mengusung tema "Harmoni Indonesia" berlangsung di Hotel Mercure Ancol Jakarta, Kamis (10/12) Malam.

Rakornas dihadiri para pejabat Eselon I, II, III dan IV di lingkungan BNPT, serta 256 anggota FKPT yang berasal dari 32 Provinsi di Indonesia. Rakornas diselenggarakan selama 3 hari mulai tanggal 10 hingga 13 Desember 2019. Kegiatan ini bertujuan untuk mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, dan mengevaluasi program kegiatan pelibatan masyarakat dalam pencegahan terorisme melalui FKPT.

Kepala BNPT, Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H., hadir untuk memberikan sambutan sebagai pembukaan resmi kegiatan Rakornas FKPT IV 'Harmoni Indonesia' 2019. Dalam sambutannya, Kepala BNPT memberikan apresiasi kerja setinggi-tingginya kepada seluruh anggota FKPT sebagai mitra BNPT dalam pencegahan radikalisme dan terorisme di setiap Provinsi.

"Kita sudah bekerja berat di tahun ini, dan di masa yang akan datang pekerjaan akan lebih berat. Dalam rakornas ini saya mengajak bapak dan ibu sekalian untuk mempererat silaturahmi dan koordinasi, kita evaluasi kinerja bersama dan susun kembali strategi pemetaan yang lebih optimal," ujar Kepala BNPT.

Tidak hanya itu, berdasarkan hasil penelitian FKPT Kearifan Lokal masih menjadi faktor daya tangkal yang kuat dalam membentengi penyebaran radikalisme. Kepala BNPT menjelaskan, kearifan lokal sebagai kekayaan bangsa sangat ampuh untuk menangkal radikalisme sehingga perlu dimanfaatkan secara optimal. Untuk meningkatkan kearifan lokal ini, perlu adanya sinergitas yang optimal berbagai



pihak. Kepala BNPT juga telah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri agar pemerintah daerah bisa menginventarisir kembali kebudayaan lokal di wilayah mereka.

“Kearifan lokal ini kita sudah minta untuk diinvestarisir kembali. FKPT menjadi inisiator dalam hal ini. Dari kita sendiri juga sudah bersurat kepada Gubernur dan Pemerintah Daerah. FKPT dalam hal ini membuat terobosan untuk menginventarisir kearifan lokal, tolong dibantu oleh pusat agar ini bisa tercapai,” ungkap Mantan Kadiv Humas Polri sebelum menutup pidatonya.

Dalam Rakornas ini Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat BNPT, Dr. Hj. Andi Intang Dulung, M.H.I., membacakan laporan pelaksanaan kegiatan Rakornas tahun ini. “Perlu disampaikan bahwa FKPT dalam keterlibatannya mencegah terorisme di daerah

telah melaksanakan kegiatan sebanyak 160 kegiatan sudah dilakukan selama 9 bulan dari Maret sampai dengan November sepanjang tahun 2019,” ujar Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat BNPT.

Dr. Hj. Andi Intang Dulung, M.H.I., berharap masyarakat luas betul-betul peduli dengan bahaya radikalisme maupun terorisme dalam hal ini dengan tidak apatis dengan perkembangan radikalisme. Dari segi kuantitas, tahun ini sebanyak 33.000 peserta telah disasar dalam program pencegahan FKPT, melalui pelibatan masyarakat dari berbagai unsur baik itu pemuda maupun perempuan, jurnalis kemudian peneliti akademisi sehingga apa yang kita lakukan itu sangat efektif untuk memberikan pengaruh kepada masyarakat dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana pentingnya pencegahan radikalisme terorisme.



Rakornas ini sekaligus menjadi malam Anugerah Indonesia Damai yang merupakan puncak penghargaan bagi Pemenang Lomba Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Inspiratif bagi Guru Agama, Lomba Karya Jurnalistik Tahun 2019 bagi Jurnalis, dan Lomba Video Pendek bagi Siswa SMA/ Sederajat tahun 2019. Lomba yang diadakan secara rutin oleh FKPT ini menjadi simbol partisipasi aktif masyarakat utamanya generasi muda dalam menyebarkan pesan damai sebagai benteng infiltrasi radikalisme maupun terorisme.

Kepala BNPT Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H. bersama Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis, dan Direktur Pencegahan, Brigjen Pol. Ir. Hamli, ME, memberi penghargaan dan hadiah kepada para pemenang di atas podium sebelum acara ditutup.



FKPT PRIORITAS
"JAGA KAMPUS KITA"
DIALOG PELIBATAN CIVITAS
ACADEMICA DALAM
PENCEGAHAN TERORISME

Sasar Kampus di Pencegahan, BNPT Pagari Mahasiswa dari Terorisme



Jakarta - Dialog Pelibatan Civitas Academica dalam Pencegahan Terorisme, Kamis (19/12/2019), kembali dilaksanakan oleh BNPT. Bertempat di Aula Hj. Zuleha, kampus Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ), Jakarta Selatan, kegiatan ini bertujuan memagari mahasiswa dan seluruh pemangku kepentingan kampus dari terorisme.

Dialog di PTIQ dilaksanakan oleh BNPT dengan menggandeng Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) DKI Jakarta. Hadir sebagai pemateri di kegiatan tersebut adalah Direktur Pencegahan BNPT, Brigadir Jenderal (Pol) Hamli, mantan anggota jaringan terorisme, Kurnia Widodo, dan sejumlah akademisi dari PTIQ.

"Kegiatan ini merupakan cara bagaimana kalangan mahasiswa tidak terpengaruh dengan terorisme," kata Ketua FKPT DKI Jakarta, Darwis M. Adji.

Mantan Kepala Badan Kesbangpol DKI Jakarta tersebut mengatakan, upaya pencegahan terorisme memang gencar dilakukannya, untuk memastikan Jakarta yang merupakan barometer pembangunan nasional aman. "Bersama-sama kami juga terus melaksanakan patroli

di perkampungan, termasuk daerah-daerah di mana terdapat kos-kosan mahasiswa," ujarnya.

Rektor PTIQ, Prof. Nasaruddin Umar, menyambut baik dilaksanakannya kegiatan diadlog di kampus yang dipimpinnya. Kegiatan ini diakuinya dapat meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi yang memang dituntut selalu baik.

"Orang-orang, di dalam dan luar negeri senang dengan lulusan PTIQ, banyak yang menjadi imam masjid-masjid besar di Indonesia. Kehadiran BNPT ini harus kita syukuri, karena kalian mahasiswa juga harus paham apa itu terorisme," ungkap Prof. Nasar.

Pria yang juga menjabat imam besar masjid Istiqlal tersebut mengaku tidak khawatir dipilihnya PTIQ sebagai lokasi pencegahan terorisme akan



mendiskreditkan Islam. Sebaliknya, kegiatan seperti ini diharapkan mampu membuka mata sebagian pihak yang selama ini memandang miring Islam sebagai agama yang mengajarkan kekerasan.

"Kita harus menjaga citra Islam, karena sudah banyak yang mencoreng Islam itu sendiri dengan istilah terorisme," pungkas Prof. Nasar.

Sementara Kepala Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat BNPT, Andi Intang Dulung, di kesempatan yang sama berharap pelaksanaan dialog di PTIQ ini bisa menjadi bekal mahasiswa dalam membantu pemerintah mencegah tersebarluasnya paham radikal terorisme.

"Ada kecenderungan teroris di Indonesia memanipulasi teks keagamaan sebagai dalih pembenaran aksinya. Melalui kegiatan ini kami mengajak para ahli dan calon ahli ilmu Al-Quran ini untuk turut serta meluruskan pemahaman yang keliru itu," jelas Andi Intang.

Selain di Jakarta, Dialog Pelibatan Civitas Academica dalam Pencegahan Terorisme juga dilaksanakan di sejumlah lokasi di sepanjang tahun 2019. Antara lain di Lampung, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Aceh, dan Sumatera Selatan. [shk/shk]



SINERGISITAS BNPT
DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
TERKAIT PROGRAM DERADIKALISASI

Perlu Kesamaan Persepsi Antar Lembaga Agar Deradikalisasi Berjalan Maksimal

Jakarta - Berhasil atau tidaknya program deradikalisasi yang dilaksanakan pada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terorisme tidak hanya bergantung pada satu lembaga, tapi perlu ada kesamaan persepsi antar lembaga terkait, sehingga program yang dijalankan bisa mendapatkan hasil yang maksimal.

Hal itu diungkapkan Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis dalam Kegiatan Sinergisitas BNPT dan Kementerian/Lembaga terkait Program Deradikalisasi tahun 2019, yang diselenggarakan Sub Direktorat Bina Dalam Lapas BNPT bertempat di Hotel Grand Boutique, Jakarta (12/12/19).

“BNPT memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik Kementerian/Lembaga, akademisi serta stakeholder terkait. Kerjasama ini akan berjalan efektif apabila ada persepsi yang sama, sehingga tahapan deradikalisasi bisa berjalan maksimal, sesuai rencana dan target,” ungkapnya.

Hendri mengungkapkan juga diperlukannya program deradikalisasi yang berkesinambungan antara BNPT serta lembaga terkait. Salah satunya dengan Dirjen Pemasyarakatan.

“Saya berkeinginan deradikalisasi yang dilaksanakan BNPT Bersama Dirjenpas itu berkesinambungan, dari



dalam Lapas sampai keluar Lapas, saya harap program deradikalisasi di dalam lapas ini bisa maksimal, sehingga di luar lapas nantinya tidak sulit lagi,” ungkapnya.

Lebih lanjut Hendri kedepan berniat akan diakan semacam program penambahan wawasan kebangsaan, keagamaan, kewirausahaan, hingga psikologi, kepada petugas yang ada di Lapas ataupun Rutan. Hal itu tak lain dan tak bukan adalah karena adanya masukan dari beberapa Kalapas, dimana BNPT selalu memberikan penguatan wawasan tersebut bagi para WBP, sehingga para petugas yang ada di Lapas ataupun Rutan juga harus mendapat penguatan wawasan itu.

“Saya dapat masukan dari Kalapas Gunung Sindur, dimana BNPT selalu memberikan tambahan wawasan, keagamaan, kewirausahaan, hingga psikologi pada para WBP. Jangan sampai wawasan yang diberikan BNPT pada WBP tidak dimengerti oleh petugas di Lapas. Jadi nantinya akan programkan penambahan wawasan ini kepada Lapas ataupun Rutan. Ini juga bentuk dari sinergisitas yang kita laksanakan ini,” ungkapnya.

Mantan Danrem 173/Praja Vira Braja ini berharap, kedepannya kerjasama antara antara BNPT serta K/L terkait bisa menjadi lebih baik, sehingga upaya penanggulangan terorisme, terutama melalui deradikalisasi bisa berjalan lebih optimal.

“Saya berharap, melalui kegiatan ini terjalin kerjasama yang lebih erat antara BNPT dengan Kementerian dan Lembaga bisa lebih baik, khususnya dengan Direktorat Jenderal Pemasarakatan dalam upaya penanggulangan terorisme melalui program deradikalisasi di dalam Lembaga Pemasarakatan ataupun Rumah Tahanan,” ungkapnya.

Kegiatan ini sendiri dihadiri pula oleh Direktur Deradikalisasi BNPT, Prof. Dr. Irfan Idris, MA, Direktur Pelindungan BNPT Brigjen Pol Herwan Chaidir, serta perwakilan dari Kejaksaan RI, Pengadilan Negeri, Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, Polri, Kemenkumham serta Akademisi.



Agar tak Mempengaruhi lainnya, Perlu adanya Strategi dalam Menangani Napiter di Lapas dan Rutan

Jakarta - Kecilnya jumlah narapidana kasus terorisme yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) dibandingkan dengan jumlah narapidana kasus lainnya tidak mengecilkan bahaya dari pada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terorisme itu sendiri.

Pengaruh besar yang dimiliki para narapidana terorisme harus ditangani dengan benar agar tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar seperti penyebaran paham radikal terorisme kepada para narapidana kasus lainnya.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkum HAM) RI, Dra. Sri Puguh Budi Utami, Bc.IP, M.Si saat memberikan keynote speech dalam kegiatan Sinergisitas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait Program Deradikalisasi Tahun 2019 yang diselenggarakan Sub Direktorat Bina Dalam Lapas pada Direktorat Deradikalisasi di Kedeputan I bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT yang berlangsung di Hotel Golden Boutique, Jakarta, Kamis (12/12/19).

“Napi teroris ini sebagian kecil. Jumlah semuanya ada 588 orang dari total sebanyak 250 ribuan warga



binaan pemasyarakatan (WBP). Tapi ini bukan masalah kecilnya WBP kasus terorisme itu. Tetapi daya pengaruhnya yang sangat luar biasa, satu orang bisa berimbas kepada banyak aspek yang membahayakan,” ungkap Dra. Sri Puguh Budi Utami, Bc.IP, M.Si.

Lebih lanjut, Utami menegaskan kedepan diperlukan kerjasama yang lebih baik dari BNPT dan Ditjen PAS, dimana menurutnya dibutuhkan strategi yang lebih baik agar program-program yang dijalankan dalam membina para napi terorisme ini menjadi lebih efektif.

“Kita sama-sama bekerja, tapi belum bekerja bersama-sama. Jadi, jika sinergisitas ini bisa dilaksanakan dengan seksama, mudah-mudahan kedepannya akan lebih efektif. Perlu satu strategi yang tepat, agar apa yang kita lakukan tidak sia-sia,” ungkapnya.

Utami pun mengapresiasi langkah yang dilakukan BNPT dengan mengadakan kegiatan mengumpulkan para petugas Lapas maupun Rutan. Dimana



menurutnya, kegiatan ini sangat penting dan akan memberikan penguatan kepada petugas yang terlibat.

“Tentunya kegiatan sharing session seperti ini sangat penting sekali untuk teman-teman kami. Kami sangat mengapresiasi hal ini, kepada Deputy dan jajaran BNPT lainnya. Karena pertemuan ini bisa dijadikan penguatan untuk jajaran kami,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Utami pun berharap kedepannya kerjasama antara BNPT dengan Ditjen PAS akan berjalan lebih baik, dimana program-program yang dimiliki BNPT bisa dijalankan dengan baik di Lapas maupun Rutan yang memiliki WBP terorisme.

“Saya harap kedepannya sinergi antara BNPT dan Ditjen PAS bisa lebih baik. Selama ini saya akui sudah baik, karena memiliki pemahaman yang sama terhadap pelaksanaan program-program yang dimotori oleh BNPT dan diimplementasikan secara operasional di Lapas dan Rutan,” tutupnya.



Dalam kegiatan ini hadir pula Deputy bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis, Direktur Deradikalisasi BNPT, Prof. Dr. Irfan Idris MA, Direktur Perlindungan BNPT, Brigjen Pol Herwan Chaidir, serta perwakilan dari berbagai Kementerian/Lembaga meliputi TNI, Polri, Kemenkumham, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Badan Intelijen Negara (BIN) serta dari Akademisi.

RAPAT EVALUASI KEGIATAN
2019 DAN PENYUSUNAN
PROGRAM KEGIATAN
DIREKTORAT PENCEGAHAN
TAHUN 2020

Evaluasi Kegiatan 2019 akan jadi Panduan dalam Program Pencegahan Penanggulangan Terorisme 2020



Yogyakarta - Direktorat Pencegahan di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memiliki tugas penting dalam melaksanakan upaya pencegahan dengan melakukan pengawasan terhadap ancaman terorisme. Karena pencegahan penanggulangan terorisme dilakukan baik di wilayah perbatasan, monitoring dan analisa serta kontra propaganda di dunia maya maupun pemberdayaan seluruh komponen masyarakat.

Tentunya ini dilakukan guna meminimalisir penyebaran pengaruh paham radikal terorisme di lingkungan masyarakat. Diharapkan akan dapat menumbuhkan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh paham radikal dan terorisme.

Hal tersebut dikatakan Deputy I bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis pada acara Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Direktorat Pencegahan Tahun Anggaran (TA) 2019 dan Perencanaan Program Kegiatan Direktorat Pencegahan TA 2020 yang berlangsung di Hotel Sheraton Mustika, Yogyakarta, Kamis (5/12/2019).

“Rapat evaluasi ini dapat dijadikan sebagai panduan bersama tentang bagaimana seluruh potensi, peran, dan keterlibatan yang selama ini dilakukan oleh seluruh pihak dapat berjalan secara sinergis dan koordinatif

sehingga dapat menghasilkan program dan kegiatan pencegahan yang komprehensif dan tepat sasaran,” ujar Deputy I BNPT, Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis.

Lebih lanjut Deputy I mengatakan bahwa evaluasi dan perencanaan dalam suatu organisasi merupakan tahapan penting yang merupakan bagian dari fungsi manajemen organisasi.

“Maksud dan tujuan rencana program dan evaluasi ini untuk mengetahui segala kekurangan-kekurangan kita yang sudah kita laksanakan selama tahun anggaran 2019 untuk kita perbaiki pada tahun program 2020. Sehingga hal-hal yang kurang di 2019 tidak kita ulangi lagi tentu harapannya agar BNPT lebih maju lagi kedepan,” tutur Jenderal berpangkat Bintang Dua tersebut.



Kedepannya mantan Komandan Satuan Induk Badan Intelijen Strategis (Dansat Induk Bais) TNI ini juga menyampaikan bahwa kedepannya akan ada pemekaran organisasi di lingkungan BNPT itu sendiri awalnya hanya tiga ke deputian akan berkembang menjadi enam ke deputian.

“Direktorat Pencegahan ini akan berubah karena akan ada pemekaran organisasi BNPT ke depan. Contoh seperti Subdit Kontra Propaganda yang menangani narasi kontra propaganda dan kontra ideologi ini akan menjadi ke deputian Kontra Radikalisasi. Jadi nanti akan ada Direktur tersendiri untuk Kontra Propaganda, Kontra Ideologi dan Kontra Narasi, sehingga lebih fokus dalam bidang kerja masing-masing,” ucap alumni Akmil tahun 1986 ini.

Karenanya mantan Komandan Korem (Danrem) 173/Praja Vira Braja, Kodam XVII/Cenderawasih ini.

mengatakan dalam kegiatan evaluasi ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembuat keputusan dalam menentukan kebijakan di masa yang akan datang yang juga berkaitan dengan pemekaran organisasi ini.

“Tujuan kita adalah untuk menjamin cara kerja yang

efektif dan efisien kepada organisasi dalam penggunaan seluruh sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Dengan adanya pemekaran ini menjadi salah satu yang akan menjadi diuntungkan di 2020 dengan catatan ada dukungan anggarannya dari pemerintah,” ungkapnya

Lebih lanjut Pria yang dalam karir militernya dibesarkan dari Pasukan ‘Baret Merah’ Kopassus TNI-AD ini mengungkapkan bahwa rencana program yang dibuat tentu harus berkesinambungan dengan program yang telah ada sebelumnya, jadi tidak sampai terputus.

“Yang jelas yang akan kita lakukan di 2020 ini adalah kelanjutan atau berkesinambungan dari tahun-tahun sebelumnya. Tidak boleh kita buat sendiri karena semuanya adalah sambungan, diluar itu masih ada juga tugas-tugas khusus oleh presiden seperti rencana untuk Jawa Barat dijadikan contoh pencegahan terorisme di seluruh Indonesia yang didelegasikan kepada BNPT. Kalau ini berhasil presiden nanti akan memerintahkan untuk seluruh provinsi mengikuti yang ada di Jawa Barat,” ujar mantan Komandan Grup 3/Sandi Yudha Kopassus ini mengakhiri

**SEMINAR CEGAH
RADIKALISME ALA MILENIAL
DI UNIVERSITAS
WIDYATAMA BANDUNG**



BNPT terus Melakukan Berbagai upaya Pencegahan Paham Radikal Terorisme di Masyarakat

Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), terus melakukan upaya-upaya untuk mengatasi ancaman penyebaran paham radikalisme dan terorisme di semua kalangan, termasuk di kalangan masyarakat, generasi muda, mahasiswa dan mahasiswi di kampus-kampus seluruh Indonesia

Kasubdit Kontra Propaganda BNPT, Kolonel Pas Drs. Sujatmiko mengatakan, pihaknya selama ini telah mengajak mahasiswa dan mahasiswi untuk berdiskusi, sebagai upaya pencegahan paham radikalisme di kalangan milenial.

"Jadi generasi muda, khususnya mahasiswa perlu tahu akar masalah mengapa terjadi radikalisme. Kemudian apakah radikalisme sedang menyerang generasi

milenial," ungkap Kasubdit Kontra Propaganda BNPT, Kolonel Pas. Sujatmiko pada acara seminar 'Cegah Radikalisme Ala Milenial,' yang berlangsung di Universitas Widyatama (UTama), Kota Bandung, Senin (9/12/2019).

Menurutnya, radikalisme bisa saja timbul dari lingkungan kaum milenial. Untuk itulah dirinya meminta kaum milenial harus mewaspadaai lingkungan di sekitarnya, seperti lingkungan kampus dan lingkungan diluar kampus.

"Sebab radikalisme itu bisa berawal dari lingkungan, maka pahami dulu lingkungan di sekitarnya dan kemudian bagaimana menghadapi bila ada yang mencurigakan. Negara saat ini memperkuat startegi nasional dalam penanggulangan terorisme," tutur alumni Sepa PK TNI tahun 1995 ini.

Dikatakannya, mahasiswa perlu untuk turut serta dalam mencegah radikalisme. Pasalnya, paham tersebut mudah dan cepat tersebar di tengah-tengah

masyarakat. "Berdasarkan penelitian-penelitian, tingkat persentasenya di atas 10 persen kecenderungan radikalisme di Indonesia," ujar alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ini.

Pihaknya sudah melakukan beragam program untuk mengatasi paham radikalisme. Sebelum terpapar, BNPT melakukan program kontra radikalisasi untuk menahan serangan propaganda dari penyebar paham radikalisme. Hal ini ditujukan kepada masyarakat yang dianggap rentan terpapar paham radikal terorisme tersebut.

Tak hanya itu mengungkapkan BNPT sendiri telah membentuk Duta Damai Dunia Maya dari kalangan milenial yang tersebar di 13 provinsi. Tidak hanya di Indonesia, Duta Dunia Maya ini juga sudah berkembang di kawasan negara ASEAN.

"Dan Alhamdulillah di Jabar sudah terbentuk. Tahun ini kita sudah membentuk Duta Damai Asia Tenggara. Tahun 2020 mendatang akan kita tingkatkan menjadi Duta Damai Global dari berbagai benua. Duta Damai Itu tugasnya melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan milenial dan menyebarkan konten dan juga informasi lain seperti web media sosial dengan menebarkan perdamaian," kata mantan Komandan Batalyon Komando 466/Pasopati Paskhas TNI-AU ini

Pria yang dalam karir militernya banyak dihabiskan di lingkungan Detasemen Bravo 90/Anti Teror Paskhas TNI AU ini menegaskan bahwa dalam menangkal paham radikalisme tentunya merupakan tugas seluruh stakeholder di Indonesia. Ia berharap agar seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) di Indonesia dapat bekerja sama memberantas radikalisme.

"Sinergitas 36 kementerian dan lembaga artinya kementerian dalam bidang apa pun dia mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pencegahan. Jadi ini sudah dihimpun maka akan dibentuk rencana aksi nasional, sehingga dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme menjadi tanggung jawab seluruh stakeholder," kata mantan Kepala Dinas Operasi (Kadis Ops) Lanud Sam Ratulangi Manado ini.

Dalam kesempatan tersebut dirinya juga menjelaskan bahwa BNPT terus melakukan program deradikalisasi terhadap narapidana terorisme dan juga mantan narapidana terorisme. Program tersebut kini, sudah menjangah 89 Lapas di 25 provinsi.



Lebih lanjut dijelaskannya, dalam melakukan program deradikalisasi di dalam lapas, langkah pertama yakni dengan melakukan identifikasi. Kemudian, memberikan wawasan kebangsaan dan keagamaan terhadap napi terorisme.

"Sedangkan di luar Lapas, ke keluarga mantan napi terorisme dengan program identifikasi dan re-edukasi, re-sosialisasi dan rehabilitasi agar mereka bisa kembali ke masyarakat," ujarnya

Selain itu, kata dia ada program kewirausahaan kepada mantan napi teroris. Tujuannya, agar mereka bisa mendapatkan mata pencaharian serta mandiri. "Para mantan napi teroris ini punya keahlian apa, dibina sedemikian rupa agar bisa kembali ke masyarakat dengan baik,"ujarnya mengakhiri.

Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Widyatama (UTama), Prof. Dr. H. Obsatar Sinaga, S.IP, M.Si, mengatakan bahwa kampus UTama merupakan tempatnya orang yang berkembang dan pendidik serta orang-orang milenial.

Untuk itu pihaknya harus mengembangkan dengan cara milenial, dengan cara memenetrasi mereka agar tidak terpapar dan tidak terpengaruh oleh perkembangan yang dilakukan kaum radikal. Pihaknya pun menyambut baik apa yang dikatakan



pemerintah agar semua masyarakat dilibatkan dalam pencegahan paham radikalisme dan terorisme.

"Kita tahu betul pandangan di masyarakat itu tidak gampang, tapi kita tidak bisa melepaskan kepada aparat saja, kita meyakini bahwa seluruh masyarakat ini Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harga mati, kita harus perjuangkan, kita harus tentang gerakan apapun bentuk radikalisme," ucap Prof Obi sapaan akrabnya.

Sebagai bentuk strategi, Obi menambahkan, mahasiswa seharusnya dilakukan penetrasi di dalam berbagai hal, misalnya mereka dilibatkan dengan organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan mereka bergerak di lingkungan masing-masing. Seperti UKM keagamaan, olahraga dan lainnya, sehingga mahasiswa lebih sportif, sibuk dan dia tidak lagi berpikir radikal.

"Misalnya ada yang mengembangkan paham itu, seperti yang pernah terjadi, mereka diberi kesempatan kepada stakeholder apapun bentuknya, deteksi dini kita lakukan," kata Pria kelahiran Deli Serdang, 17 April 1969 ini.

Dia berharap, agar mahasiswa Universitas Widyatama lebih konsentrasi dan mereka agar cepat lulus. Meskipun ada kegiatan lain seperti softskill, maka softskill itu dilakukan di hari-hari tertentu dan tidak mengganggu perkuliahan.

Dalam kesempatan tersebut Prof Obi juga mengatakan, bahwa saat ini masih banyak mahasiswa yang belum mengetahui makna dari radikalisme itu sendiri.

Terlebih berdasarkan banyak riset, tidak semua millennial memahami radikalisme.

"Maka pemahaman ini perlu ditingkatkan, karena akan berbahaya. Bisa jadi seseorang tidak menyadari bahwa dirinya sedang diberikan materi-materi yang sebenarnya itu radikalisme," kata pria yang juga Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung ini

Selain itu, Obsatar menilai saat ini pemerintah masih belum tegas dalam menentukan siapa yang memiliki kewenangan khusus untuk menanggulangi terorisme. Pasalnya saat ini tidak hanya ada dari pihak kepolisian namun ada beberapa badan lain yang juga menangani terorisme.

"Negara juga masih belum menentukan siapa yang sebetulnya berhak untuk fokus menanggulangi terorisme. Apakah polisi, tapi dia pun juga punya tugas mengatur lalu lintas ketertiban umum dan jadi belum terfokus," kata pria yang juga menjadi dosen non organisk di Seskoad, Seskoau maupun Sesko TNI ini.

Seperti diketahui, seminar dan deklarasi 'Cegah Radikalisme Ala Milenial' yang dihadiri tidak kurang 300 orang ini diselenggarakan atas kerjasama Universitas Widyatama dengan Pengurus Daerah Ikatan Journalis Televisi Indonesia (IJTV) Jawa Barat. Narasumber lain yang hadir yakni Radi Setiawan selaku Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi kanwil Kemenkum HAM, Jawa Barat dan AKBP Drs. Rizal Wirawan, SH.,MH, selaku Kasubdit Kamsus Dit. Intelkam Polda Jabar.

**PEMINDAHAN
SEMBILAN NAPI TEROSRISME
KE DELAPAN LAPAS
DI INDONESIA**



BNPT Koordinasikan Pindahkan Napiter dari Rutan PMJ ke Lapas untuk Jalankan Program Deradikalisasi Lebih Mendalam

Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama instansi Kementerian/ lembaga (K/L) terkait lainnya akan terus melaksanakan program deradikalisasi lebih mendalam terhadap narapidana kasus terorisme (napiter). Tidak hanya terhadap napiter pria saja, napiter wanita pun juga tak luput dari program deradikalisasi yang dilakukan BNPT.

Hal tersebut terlihat saat BNPT melalui Subdit Hubungan Antar Lembaga Aparat Penegak Hukum (Apgakkum) pada Direktorat Penegakan Hukum di Kedeputan II bidang Penidakan dan Pembinaan Kemampuan memfasilitasi dan mengkoordinasikan pemindahan terhadap sembilan (9) napiter wanita dari

Rumah Tahanan Polda Metro Jaya (Rutam PMJ) ke delapan lokasi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang ada di beberapa daerah di Indonesia. Pemindahan terhadap sembilan napiter ini berlangsung pada Selasa-Rabu (17-18/12/2019).

“Alhamdulillah dalam dua hari ini BNPT telah mengkoordinasikan kegiatan pemindahan terhadap narapidana terorisme wanita dari rutan Polda Metro Jaya ke beberapa Lapas yang ada di Indonesia. Dimana pemindahan ini dilakukan setelah adanya kekuatan hukum tetap (incracht), Dan nantinya akan dilakukan proses deradikalisasi yang lebih mendalam,” ujar Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) BNPT, Brigjen Pol. Eddy Hartono, S.Ik, MH, disela-sela kegiatan tersebut.

Lebih lanjut alumni Akpol tahun 1990 ini menjelaskan bahwa sesuai dengan pasal 43 D Undang-Undang

(UU) No.5 tahun 2018 tentang Penanggulangan Terorisme, yang mana salah satu tugas BNPT yaitu mengkoordinasikan aparat penegak hukum.

Yang mana dalam konteks ini BNPT mengkoordinasikan para aparat penegak hukum dalam rangka penyelenggaraan proses tindak pidana terorisme, yang dimulai dari tingkat penyidikan, pra penuntutan, pelaksanaan putusan di pengadilan sampai pelaksanaan eksekusi dan penempatan napiter itu sendiri.

“Untuk itu pada hari ini kita mengkoordinasikan dalam penempatan narapidana terorisme wanita itu. Yang mana ada sebanyak sembilan napiter wanita yang akan dilakukan penempatan berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh gabungan tim assement,” ujar mantan Wakil Kepala Detasemen Khusus (Waka Densus) 88/Anto Teror Polri ini

Dimana menurut Dirgakkum BNPT ini bahwa tim assement tersebut terdiri dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), penyidik dari Densus 88/AT Polri, jaksa dan juga ahli Psikologi serta lainnya.

“Sehingga sembilan napiter wanita ini ditempatkan di beberapa Lapas yang ada di wilayah Indonesia Ada yang di Lapas Jakarta, Tangerang ada yang di Makassar dan di daerah lainnya. Dan itu dalam rangka pembinaan selanjutnya yakni program deradikalisasi berdasarkan hasil assement terhadap napiter wanita ini,” kata perwira tinggi berpangkat bintang satu kelahiran Jakarta 30 Mei 1967 ini.

Dijelaskan pria yang juga pernah menjadi Kadensus 88/AT Polri ini, ke sembilan napiter wanita ini memang tidak ditempatkan di dalam satu lapas namun ditempatkan beberapa lapas dikarenakan

memang konsep daripada penempatan narapiter ini adalah berdasarkan hasil daripada assement itu sendiri.

“Artinya bahwa hasil identifikasi dan penilaian yang mana setiap individu napiter ini memiliki karakter tersendiri, sehingga lapas yang memungkinkan untuk sembilan napiter wanita ini disesuaikan dari hasil sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) itu sendiri. Hasil itulah untuk menentukan dimana



tepatnya mereka akan ditempatkan,” kata mantan Kapolres Hulu Sungai Selatan ini.

Untuk itu mantan Kabid Investigasi Densus 88 Polri ini berharap kedepannya kegiatan seperti ini akan terus berlanjut dan berkesinambungan. Karena didalam pekerjaan penanggulangan terorisme itu harus sistematis terpadu dan berkesinambungan.

“Dan tentunya selanjutnya setelah penempatan ini akan dilaksanakan program deradikalisasi terhadap sembilan napiter perempuan ini. Dan tentunya penempatan ini juga akan bisa lebih fokus dan terarah dalam menjalani pembinaan melalui program deradikalisasi nantinya,” ujar mantan Penyidik IT dan Cyber Crime Unit Dit II Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri ini mengakhiri.

Sementara itu Kasi Hubungan Antara Lembaga Daerah BNPT, Kompol I. Nyoman Sarjana, S.Ik, M.A.P, yang dalam kesempatan tersebut turut serta mengkoordinasikan pemindahan napi tersebut menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Ditjen PAS, Densus 88/Anti Teror Polri, dan Kejaksaan dalam pemindahan napiter ini.



“Pada hari ini kita dari BNPT dan Densus 88 dan rekan-rekan dari Ditjen PAS mendapatkan tugas untuk memindahkan sembilan napiter wanita ke delapan Lapas yang ada di Indonesia yakni ke Semarang, Malang, Lampung, Palembang, Makassar, Tangerang, Bandung yang masing-masing satu napi dan Jakarta dua napi,” kata Kompol Nyoman.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa pemindahan napiter wanita tersebut menggunakan transportasi udara untuk penempatan di Lapas luar DKI Jakarta dan Bandung dan transportasi darat untuk napiter yang ditempatkan di Lapas yang berada di wilayah DKI Jakarta dan Bandung.

“Yang kesemuanya tentu mendapatkan pengawasan dari rekan-rekan dari Densus 88/Anti Teror dengan didampingi rekan-rekan dari Rutan Gunung Sindur dan Ditjen PAS. Mudah-mudahan dapat tiba tepat waktu tanpa ada hambatan. Mohon doanya mudah-mudahan perjalanan ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan sampai di tempat masing-masing,” katanya mengakhiri.



Seperti diketahui, dalam penempatan dan pemindahan napiter tersebut BNPT juga telah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen PAS Kemenkum HAM), Densus 88/Anti Teror Polri, Kejaksaan Agung dan Panitera Pengadilan Negeri seluruh Wilayah DKI Jakarta.

Adapun ke sembilan napiter wanita yang dipindahkan ini adalah AIK (vonis 4 tahun), MID alias L (3 tahun 6 bulan), Dsm (2 tahun 8 bulan), DMY (3 tahun 4 bulan), BR (3 tahun), SNA (3 tahun), EL (3 tahun 6 bulan), Nhs (6 tahun) dan Drc alias My (4 tahun).

KUNJUNGAN KEPALA BNPT
KE REPUBLIK CEKO



Antisipasi FTF Returnees, BNPT jalin Kerjasama dengan Pemerintah Ceko

Praha - Permasalahan *Foreign Terrorist Fighters* (FTF) *Returnees* yang dipulangkan atau kembali dari daerah konflik di Suriah yang mana negara-negara Eropa barat kebanyakan hanya menerima returnees anak-anaknya saja, tentunya telah menjadi perhatian serius dunia internasional. Kerjasama dengan negara-negara lainpun terus dilakukan Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam menangani FTF tersebut dalam mencari solusinya.

Hal ini terlihat saat Kepala (BNPT), Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH, saat melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Ceko, Jakub Kulhanek di kantor Kementerian Dalam Negeri Republik Ceko, Praha, pada Jumat (29/11/2019) lalu waktu setempat.

“Tentunya penting sekali bagi Indonesia untuk menjalin kerjasama dalam rangka berbagi informasi dengan Republik Ceko ini guna mencari solusi terkait penanganan FTF tersebut,” kata Kepala BNPT Komjen Pol Drs. Suhardi Alius, MH dalam pertemuan tersebut.

Dalam pertemuan tersebut Kepala BNPT yang juga didampingi Deputy II bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Irjen Pol Drs. Budiono Sandi, M. Hum, Direktur Kerjasama Bilateral Brigjen Pol Drs. Kris Erlangga dan Kasi Kerjasama Eropa BNPT AKBP Zaenal Ahzab., mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia sendiri sampai saat ini juga belum mengambil keputusan politik untuk menerima kembalinya FTF dari medan konflik walaupun Indonesia memiliki sekitar 500 FTF di Suriah termasuk wanita dan anak-anak

“Tentunya jumlah tersebut sebenarnya kalau dipersentasi dapat dikatakan kecil dibandingkan dengan jumlah populasi penduduk Muslim Indonesia

yang mencapai lebih dari 200 juta orang. Bahkan sangat kecil jika dibandingkan dengan FTF dari negara bekas Uni Soviet yang mencapai 10.000 dan FTF dari Xin Jiang, China yang mencapai 5000 orang,” ujar mantan Sekretaris Utama (Sestama) Lemhannas RI ini.

Namun demikian dihadapan Pemerintah Ceko tersebut, Kepala BNPT mengatakan dengan tegas bahwa terorisme tidak dapat dikaitkan dengan agama, kebangsaan, atau peradaban apapun. Ini dapat dibuktikan dengan insiden serangan teroris yang terjadi di Selandia Baru, Sri Lanka dan di Texas AS. Masalah serius yang dihadapi Indonesia adalah terjadinya beberapa serangan teror bom seperti di Surabaya dan Sumatera Utara dimana pelakunya melibatkan para wanita yang terpapar paham radikal lebih keras dari suaminya.

“Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk menjalin kerjasama berbagi informasi dengan Republik Ceko ini guna mencari solusi terkait dalam penanganan FTF Returnees melalui kerangka perjanjian kerjasama MoU seperti yang telah dilakukan Indonesia dengan beberapa negara lain,” ujar mantan Kabareskrim Polri ini.

Dalam kesempatan tersebut alumni Akpol tahun 1985 ini juga menjelaskan tentang strategi pencegahan terorisme dengan pendekatan lunak (soft approach) yang belum dilakukan oleh negara lain seperti program Deradikalisasi bahkan juga Rekonsiliasi Nasional yang mempertemukan 124 mantan napi teroris dan 51 korban dari aksi terorisme untuk memelihara budaya pengampunan.

“Selain itu kami juga sudah membentuk Duta Damai Dunia Maya pada lingkup Nasional, Regional ASEAN sebagai upaya untuk menyebarkan pesan positif guna melawan propaganda terorisme melalui internet dan media sosial. Bahkan pada tahun 2020 nanti BNPT juga berencana akan membentuk Duta Damai Dunia Maya Global,” tutur mantan Kapolda Jawa Barat ini.

Dalam pertemuan itu Kepala BNPT juga menyampaikan bahwa ini adalah kali pertama pihaknya berkunjung ke Republik Ceko. Namun demikian dirinya mengakui



telah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Duta Besar Republik Ceko untuk Indonesia di Jakarta, Y.M. Ivan Hotek.

“Bahkan kami (Indonesia) pada bulan Juni kemarin bersama Slovakia juga sudah menandatangani MoU kerjasama penanggulangan terorisme di Bratislava,” ujar mantan Kepala Divisi Humas Polri ini yang alam kesempatan tersebut juga didampingi Duta Besar RI untuk Republik Ceko, Kenssy Dwi Ekaningsih.

Menurutnya, BNPT adalah lembaga setingkat Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan mengkoordinir 36 Kementerian dan Lembaga (K/L) karena BNPT yang harus mengidentifikasi akar masalah terorisme di Indonesia.

“Terorisme adalah ancaman global namun setiap negara memiliki akar masalah yang berbeda-beda menyebabkan munculnya serangan terror. Itulah sebabnya kerjasama internasional sangat diperlukan tidak hanya dalam lingkup bilateral tapi juga regional dan multilateral,” ujar mantan Wakapolda Metro Jaya ini.

Sementara itu Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Ceko, Jakub Kulhanek yang dalam kesempatan tersebut



didampingi antara lain oleh Direktur Dinas Intelijen Republik Ceko sangat senang bisa bertemu dengan Kepala BNPT. Menurutnya masalah terorisme ini telah menjadi masalah global yang hanya bisa diatasi melalui kerjasama internasional

“Walaupun letak geografi antara Ceko dan Indonesia sangat jauh, namun seluruh dunia mengakui bahwa teroris tidak mengenal batas negara. Seluruh komunitas internasional dituntut untuk bekerjasama dalam memerangi terorisme. Dan kami bersyukur bisa melakukan pertemuan dengan pemerintah Indonesia,” kata Jakub Kulhanek.

Dirinya mengatakan bahwa Republik Ceko sangat berharap dapat bekerjasama lebih serius dengan pemerintah Indonesia. Namun dirinya mengatakan bahwa Republik Ceko tidak memiliki lembaga penanggulangan terorisme yang terpusat seperti BNPT. Terorisme di Republik Ceko ditangani oleh Badan Intelijen Domestik dan Luar Negeri, serta Kepolisian Nasional yang bertanggung jawab kepada Perdana Menteri.

Bahkan draft MoU yang disampaikan oleh BNPT telah dipelajari dan dikoreksi di beberapa pasalnya. Dan pemerintah Ceko sedang menyusun bentuk penandatanganan kesepakatan kerjasama lebih luas yang tidak hanya mencakup terorisme, kerana selama ini Indonesia dan Rep. Ceko telah menjalin kerjasama

Police to Police terutama dalam bidang penanganan ‘Searching for Wanted and Missing Person’.

“Karena kami (Ceko) merupakan anggota Uni Eropa dan masuk dalam koalisi NATO yang mengandalkan Badan Intelijen dan Kepolisian dalam menangani terorisme serta melindungi warga Ceko dari ancaman ekstremisme kekerasan,” ujarnya.

Kulhanek mengatakan bahwa pemerintah Republik Ceko merasa bersyukur karena sampai saat ini belum pernah terjadi insiden serangan terorisme di Republik Ceko. Dan bahkan pemerintahannya juga belum melihat adanya indikasi warga Ceko yang pergi ke Suriah.

“Tetapi kami mulai mewaspadai meningkatnya propaganda ‘hate-speech’ melalui media sosial yang benyebar di dalam kehidupan masyarakat Ceko yang makin berbahaya dari sebelumnya. Kami mengatasi masalah ini dengan menggelar operasi khusus yang menganalisa isu-isu kebencian terhadap pemerintah yang semakin meresahkan dan perlu ditanggapi dengan serius,” kata Kulhanek.

Di kesempatan tersebut dirinya juga menyampaikan permohonan maaf karena Menteri Dalam Negeri Republik Ceko yang awalnya akan menerima delegasi BNPT berhalangan hadir karena harus mengikuti rapat dengan parlemen Republik Ceko.



Kepala BNPT : Jangan Stigmakan Agama tertentu dalam Aksi Terorisme

Praha - Aksi radikal terorisme tidak bisa diasosiasikan atau distigmakan dengan ideologi agama tertentu, suku, bangsa, maupun suatu kewarganegaraan. Karena pada dasarnya tidak ada satupun agama di dunia ini yang mengajarkan ajaran radikalisme termasuk mengajarkan tentang kekerasan.

Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH, saat melakukan pertemuan dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Ceko dan Diaspora Indonesia di Wisma Duta, KBRI di Praha, Republik Ceko, Jumat (28/11/2019). Acara tersebut merupakan rangkaian dari kunjungan Kepala BNPT ke Praha, dimana sebelumnya bertemu dengan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Ceko, Jakub Kulhanek.

"Bahkan dalam forum internasional termasuk di PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) pun saya katakan bahwa jangan stigmakan agama tertentu dalam kasus terorisme ini. Karena itu adalah pemahaman agama yang salah tafsirkan. Bahkan saat ini PBB telah mencoba merubah istilah terrorism menjadi Violent Extremism," ujar Kepala BNPT, Komjen Pol Suhardi Alius.

Lebih lanjut Kepala BNPT menjelaskan bahwa selama ini dirinya telah merumuskan konsep radikalisme di Indonesia dalam empat unsur, yaitu intoleransi, anti Pancasila, anti NKRI, dan Paham Takfiry atau paham mengkafirkan orang lain selain kelompoknya. Untuk itu, BNPT pun saat ini menggunakan metode soft approach dalam menangani permasalahan terorisme.

"Mengapa harus menggunakan pendekatan secara halus? Menilik kasus Bom Bali lalu bahwa aksi kekerasan tidak bisa dilawan dengan kekerasan, karena bisa menimbulkan rasa dendam dan kebencian.



Untuk itulah kami mencoba menerapkan pola soft approach. Kita sentuh mereka dengan hati Metode ini juga sudah kami sampaikan di berbagai belahan dunia, yakni dalam setiap pertemuan tingkat tinggi," kata mantan Kabareskrim Polri ini.

Menurut alumni Akpol tahun 1985 ini, kekerasan tentunya juga bisa diselesaikan dengan kebaikan dan sentuhan-sentuhan kepada para pelaku tindak terorisme. Hal ini agar para pelaku tindakan terorisme ini dapat sadar dan memahami bahwa jalan yang mereka tempuh adalah salah.

"Tidak mudah memang, namun ini butuh bantuan dari berbagai pihak. Salah satunya diaspora dan mahasiswa yang berada di luar negeri sebagai agen pemerintah Indonesia untuk bisa menyampaikan hal-hal yang baik tentang Indonesia," ujar mantan Kapolda Jawa Barat ini

Lebih lanjut mantan Kepala Divisi Humas Polri ini menjelaskan, jika dilihat dari sejarah Indonesia, sifat kebangsaan itu sudah lahir sejak 17 tahun sebelum

Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 1928. Dimana para pemuda saat itu telah mendeklarasikan Sumpah Pemuda yang merupakan hasil pemikiran tentang pentingnya jiwa kebangsaan, persatuan antar ras dan suku yang berbeda, serta penguatan nilai-nilai moral bangsa.

"Artinya, perjuangan bangsa Indonesia untuk melawan intoleransi, mengakui perbedaan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman kebangsaan sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Sudah hampir 100 tahun bangsa ini mempertahankan nilai kebangsaan, dan jangan sampai nilai ini rusak hanya karena ego sektoral dan turbulensi politik yang justru memecah belah persatuan bangsa," kata mantan Wakapolda Metro Jaya ini mengakhiri.

Ramah tamah Kepala BNPT dengan PPI Ceko dan Diaspora Indonesia di Republik Ceko ini dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari para audience kepada Kepala BNPT dan ditutup dengan makan malam bersama dan sesi foto bersama.

Ramah Tamah Kepala BNPT Dengan Diaspora Indonesia Di Republik Ceko

Praha - Kepala BNPT menegaskan bahwa tidak ada satupun agama di dunia ini yang mengajarkan ajaran radikalisme, oleh karena itu aksi radikal tidak bisa diasosiasikan dengan ideologi agama tertentu, suku bangsa, maupun suatu kewarganegaraan, karena pada dasarnya tidak ada sama sekali agama yang mengajarkan tentang kekerasan. Kepala BNPT juga menjelaskan bahwa saat ini perserikatan bangsa bangsa telah mencoba merubah istilah terrorism menjadi *Violent Extremism*.

Lebih lanjut Kepala BNPT pun mengaku telah merumuskan konsep radikalisme di Indonesia dalam empat unsur, yaitu intoleransi, anti Pancasila, anti NKRI; dan Paham Takfiry atau paham mengkafirkan orang lain selain kelompoknya. Untuk itu, BNPT pun saat ini menggunakan metode soft approach dan approach. Metode pendekatan itupun telah disampaikan di berbagai belahan dunia, yakni dalam setiap pertemuan tingkat tinggi. "Mengapa harus menggunakan pendekatan secara halus? Menilik kasus Bom Bali, kekerasan tidak bisa dilawan dengan kekerasan," jelas kepala BNPT.

Menurutnya, kekerasan bisa diselesaikan dengan kebaikan dan sentuhan-sentuhan kepada para pelaku tindak terorisme agar sadar dan memahami kepada mereka bahwa jalan yang mereka tempuh adalah salah.

"Tidak mudah memang, namun ini butuh bantuan berbagai pihak. Salah satunya diaspora dan mahasiswa yang berada di luar negeri sebagai agen pemerintah untuk menyampaikan hal-hal yang baik tentang Indonesia," ujarnya.



Kepala BNPT melanjutkan, jika dilihat dari sejarah Indonesia, sifat kebangsaan sudah lahir sejak 17 tahun sebelum Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 1928, dimana para pemuda saat itu telah mendeklarasikan Sumpah Pemuda yang merupakan hasil pemikiran tentang pentingnya jiwa kebangsaan, persatuan antar ras dan suku yang berbeda, serta penguatan nilai-nilai moral bangsa. Artinya, perjuangan bangsa Indonesia untuk melawan intoleransi, mengakui perbedaan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman kebangsaan sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka.

"Sudah hampir 100 tahun bangsa ini mempertahankan nilai kebangsaan, dan jangan sampai nilai ini rusak hanya karena ego sektoral dan turbulensi politik yang justru memecah belah persatuan bangsa," imbuhnya.

Hal itu juga disampaikan Suhardi Alius dalam pertemuan dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Ceko dan Diaspora Indonesia di Wisma Duta, KBRI Ceko, Praha, Jumat (28/11/2019). Acara tersebut merupakan rangkaian dari kunjungan Kepala BNPT ke Praha, dimana sebelumnya bertemu dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Ceko.

Ramah tamah Kepala BNPT dengan Diaspora Indonesia di Republik Ceko dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari audience kepada Kepala BNPT, dan ditutup dengan makan malam bersama dan sesi foto bersama.



KEPALA BNPT

TEMUI WANTAP RI UNTUK PBB
DI JENEWA, SWISS



Masalah FTF Returnees jadi pembicaraan Kepala BNPT saat bertemu Perwakilan Tetap RI PBB di Jenewa

Praha-Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus mendalami kebijakan yang dilakukan dunia internasional terhadap *Foreign Terrorist Fighters* (FTF) returnees wanita dan anak-anak. Hal ini karena ada alasan yang dilematis seperti kebijakan Uni Eropa dan Australia yang hanya menerima returnees anak-anak saja, sementara di Jerman setelah returnees anak-anak dipulangkan ternyata pengadilan memutuskan untuk menjemput ibunya.

Hal tersebut dikatakan Kepala BNPT, Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH, saat melakukan pertemuan dengan Andreano Erwin selaku Deputy Wakil Tetap I Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) untuk PBB di Jenewa, Swiss, Selasa (3/12/2019) waktu setempat.

“Itulah sebabnya pihak Jerman saat ini juga tengah melaksanakan pertemuan dengan para pakar terorisme

dari Indonesia di Wiesbaden guna mengetahui lebih dekat dan mempelajari bagaimana cara Indonesia menjalankan empat tahapan deradikalisasi dimulai dari indentifikasi, rehabilitasi, edukasi sampai reintegrasi sosial,” ujar Kepala BNPT, Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH di hadapan Andreano Erwin.

Pertemuan ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas tentang kebijakan dan program terkini yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia dalam penanggulangan terorisme, serta menindaklanjuti komitmen tinggi Indonesia mengenai perlindungan HAM dalam penanggulangan terorisme, termasuk melalui proses peradilan dan deradikalisasi.

Bahkan Kepala BNPT mengatakan bahwa dirinya beberapa waktu lalu juga sudah bertemu dengan *Chief of Mission International Organization for Migration* (IOM) Indonesia, Louis Paul Hoffman, di Jakarta untuk mengetahui lebih jauh tentang proses pemulangan returnees antara lain asal Afrika yang didanai oleh IOM.



Mantan Kabareskrim Polri ini juga mengatakan bahwa, BNPT sendiri sangat serius untuk ingin bekerjasama dengan IOM terutama dalam menangani returnees wanita dan anak-anak. Karena IOM juga memiliki pemahaman yang sama dengan BNPT mengenai motivasi wanita dan anak-anak yang berangkat ke medan konflik seperti Suriah dan Irak.

“Alasan lain karena di kita (Indonesia) punya populasi Muslim terbesar di dunia, namun secara kuantitatif jumlah WNI yang berangkat ke medan konflik sekitar 500 orang termasuk wanita dan anak-anak. Itu termasuk kecil dibandingkan negara lain. Artinya Indonesia mampu mendeteksi, mencegah dan mereduksi jumlah FTF yang akan berangkat ke medan konflik,” kata mantan Sekretaris Utama Lemhannas RI ini yang dalam kesempatan tersebut juga didampingi Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim.

Alumni Akpol tahun 1985 ini juga mengatakan bahwa strategi penanggulangan terorisme melalui pendekatan lunak yang dilakukan Indonesia sudah diperkenalkannya saat tampil sebagai pembicara di berbagai konferensi internasional yang diselenggarakan oleh PBB, Uni Eropa, ASEAN serta berbagai pertemuan regional dan internasional lainnya.

“Bahkan bapak Presiden bersama pak Menko Polhukam dan bu Menlu juga menyampaikan hal yang sama saat menghadiri berbagai konferensi internasional mengenai isu-isu terorisme. Oleh karena itu, kami berharap peran dan dukungan yang besar dari PTRI untuk mensosialisasikan strategi penanggulangan terorisme ini kepada seluruh counterpart PTRI di Jenewa. Karena keberhasilan Indonesia dalam menangani terorisme terbukti menjadi salah satu alasan Indonesia diterima menjadi anggota Dewan HAM PBB,” ujar mantan Wakapolda Metro Jaya ini.



Sementara itu Andreano Erwin mengatakan bahwa pihaknya saat ini sedang berkoordinasi dengan pejabat IOM, khususnya yang menangani Partnership Regional East Afrika Counter Terrorism (PREACT) untuk dapat mengatur pertemuan dengan delegasi BNPT. Dimana PREACT sendiri adalah program berbasis komunitas untuk mencegah ekstremisme kekerasan yang didanai oleh US-AID, termasuk program Demobilization, Reintegration and Disarmament yang berkaitan dengan FTF.

“IOM saat ini sedang menjalankan program Rehabilitatif untuk 1000 orang returnees asal Kosovo yang merupakan keluarga yang tidak terjerat kasus kriminal. Kosovo adalah negara bekas Yugoslavia, tetapi negara ini belum diakui oleh Pemerintah kita (Indonesia). Sementara prinsip kerja IOM sendiri akan selalu menghormati kedaulatan suatu negara,” ujar Andreano Erwin menjelaskan.

Bahkan pihaknya secara intens terus berkomunikasi dengan seorang pejabat IOM pada working level bernama Jason Aplon yang nantinya dapat bertemu dengan pejabat terkait di BNPT. “Paling tidak untuk membangun network agar dapat mengetahui lebih rinci mengenai program PREACT. Dan kami juga berjanji akan bertemu langsung dengan pihak IOM guna menindaklanjuti hasil pertemuan ini,” ujarnya mengakhiri

Seperti diketahui, dalam pertemuan tersebut kepala BNPT juga didampingi Deputi II bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Irjen Pol Drs. Budiono Sandi, M. Hum, Direktur Kerjasama Bilateral Brigjen Pol Drs. Kris Erlangga dan Kasi Kerjasama Eropa BNPT AKBP Zaenal Ahzab. Sementara itu Andreano Erwin tampak didampingi Atase Pertahanan KBRI Paris, Kolonel M. Yusrif Guntur dan beberapa staf PTRI yang menangani urusan Politik, HAM dan IOM.



FOTO KEGIATAN

15 November 2019



Rakor Duta Damai Global

16 November 2019

Edisi Januari 2019 - **Jalan Damai**

Upacara Bendera di lingkungan BNPT

06 Januari 2020



A person's hands are shown writing in a notebook with a red pen. A laptop is open in the background. The scene is dimly lit, with a dark overlay on the image.

PRODUK KREATIF

KONTRA PROPAGANDA





KOMIK ABC

SEMBARANGAN



KOMIK ABC





Damai itu
Indonesia